

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Komunikasi, Advokasi/ pendampingan, dan Konsultasi

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program Pembangunan yang Berkeadilan, dan hasil Rapat Kabinet pada 13 Februari 2011 tentang Evaluasi Kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi dasar untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada berbagai wilayah di Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, program pengentasan kemiskinan diarahkan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), salah satu kegiatannya adalah tentang mata pencaharian alternatif. Dengan demikian, maka pada kawasan pedesaan pesisir terdapat berbagai program pembangunan dari berbagai sektor yang sarannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada bagian lain, strategi pada tingkat pusat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter, sedangkan pada tingkat daerah pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin).

Melihat pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan pada tingkat daerah, maka kawasan pesisir dan nelayan dimungkinkan berpeluang terdampak negatif terhadap kemandirian masyarakat untuk mengakses sumberdaya dan perekonomian. Selain terdampak pada keterberdayaan

masyarakat juga mempersulit peran lembaga peneliti untuk berpartisipasi langsung dalam program penanggulangan kemiskinan.

Terkait hal tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan membentuk Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 tentang Pembentukan KIMBis dalam mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan. KIMBis adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi.

Melalui inisiasi BBPSEKP, KIMBis dibentuk dengan tujuan untuk mengimplementasikan pengembangan ekonomi kawasan berbasis IPTEK yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG KP). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu penunjang program pengentasan

kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan/pesisir. Sedangkan tujuan utama KIMBis dibentuk adalah agar:

1. Mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* dalam masyarakat nelayan/pesisir sehingga mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Mempercepat proses diseminasi, adopsi dan difusi teknologi kelautan dan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi.

KIMBis memiliki dua pendekatan dimana *bottom up* yang dibangun atas dasar partisipasi masyarakat dan *top down* yaitu pelaksanaan aktivitas yang telah dirumuskan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah. Sedangkan peranan KIMBis dirancang untuk bersinergi dengan kelembagaan yang sudah ada untuk membangun pemberdayaan, memanfaatkan teknologi tepat guna dengan tujuan mendorong tumbuh kembangnya *entrepreneurship* dalam masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan mempercepat proses diseminasi, adopsi dan difusi teknologi kelautan perikanan dan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan teknologi introduksi (Petunjuk teknis KIMBis, 2011:4)

Penetapan keberadaan KIMBis pada lokasi sasaran dilatarbelakangi pertimbangan mendasar pada ketersediaan potensi sumberdaya yang memadai dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, sedangkan potensi perikanan khususnya perikanan laut belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir terutama masyarakat miskin. Penetapan lokasi/kabupaten didasarkan pada SK Kepala BBPSEKP/ kuasa pengguna anggaran tentang revisi

penetapan nama pengurus KIMBis tingkat lokasi/kabupaten nomor 23.1/BALITBANGKP/BBPSEKP/TU.110/VII/2013. Surat keputusan tersebut sekaligus sebagai kelanjutan kegiatan KMIBis pada tahun 2011, yang mana dilakukan pada 5 lokasi di awal inisiasi (Tabel 1). Berikut ini adalah daftar Lokasi/Kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan KIMBis:

Tabel 15. Lokasi/Kabupaten Pelaksanaan KIMBis

No.	Provinsi	Lokasi KIMBis/Kabupaten
1.	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara
2.	Jawa Barat	Subang
3	Jawa Barat	Indramayu
4	Jawa Tengah	Tegal
5	Jawa Tengah	Brebes
6	Jawa Tengah	Wonogiri
7	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul
8	Jawa Timur	Lamongan
9	Jawa Timur	Pacitan
10	Sulawesi Selatan	Pinrang
11	Nanggro Aceh Darussalam	Banda Aceh
12	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
13	Jawa Barat	Sukabumi
14	Sumatera Utara	Danau Toba
15	Jawa Tengah	Pati

Sumber: Revisi penetapan pengurus KIMBis tingkat Lokasi/Kabupaten Nomor 23.1/BALITBANGKP/BBPSEKP/TU.110/ VII/2013 (Diolah penulis)

Ditetapkannya Kabupaten Lamongan sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis, dikarenakan adanya potensi perikanan khususnya perikanan tangkap laut. Sebagaimana dapat ditampilkan, Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan yang mencakup tiga tipologi, antara lain perikanan tangkap laut, perikanan budidaya, dan produk kelautan (wisata bahari dan garam). Di lihat dari sisi sumberdaya penunjang, Kabupaten Lamongan dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 47,162 Km memiliki 5 tempat pendaratan ikan

menghubungkan barat hingga timur, yaitu Weru, Brondong, Kranji, Labuhan, dan Lohgung dengan pusat pendaratan ikan (PPI) berada di Pelabuhan Perikanan Nasional Brondong. Menurut data BPS yang dimuat pada Lamongan dalam angka menunjukkan, pada tahun 2012 data produksi ikan yang dihasilkan dari tahun 2006 hingga 2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,58% (Tabel 11), hal ini didukung potensi sumber daya manusia perikanan tangkap laut sebanyak 28.154 nelayan dan masyarakat lain yang terlibat dalam rangkaian kegiatan penangkapan seperti pemasaran hasil dan pengolahan hasil tangkapan.

Adapun Desa Weru dipilih sebagai lokasi KIMBis di Kabupaten Lamongan karena menjadi salah satu sentra perikanan laut dan usaha pengolahan namun masih menggunakan teknologi sederhana dan nilai tambah kurang. Berdasarkan buku profil desa Weru tahun 2012, total kepala keluarga desa Weru adalah 1.318 KK, maka jumlah penduduk mencapai 4.882 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan adalah 4.393 jiwa. Sedangkan, armada penangkapan ikan digunakan pada umumnya berukuran <5GT dan jumlah pendapatan kepala keluarga adalah Rp. 700.000,- serta tingkat kesejahteraan penduduk masih cukup rendah yaitu 20,8% dari total kepala keluarga (Profil desa Weru, 2012).

Melihat potensi sekaligus permasalahan di atas, keinginan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) untuk menjadikan kawasan Weru Komplek sebagai lokasi kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum lokasi ditetapkan, dengan lebih dulu mengadakan *survey* lokasi kelayakan. Hal ini seperti

disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Jauh sebelum ditetapkan, pelaksana pusat dengan tim pendahulunya secara langsung melihat lima wilayah pusat pendaratan ikan (Brondong, Labuhan, Lohgung, Kranji dan Weru) dan juga potensinya. Sasaran kegiatan mereka adalah Weru Komplek terdiri dari 4 desa. Desa Weru nilai tambahnya kurang, walaupun banyak usaha pengolahan nilai tambah terhadap produk yang ada itu kurang”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.05 WIB di Sekretariat KIMBis Desa Weru Paciran, Kabupaten Lamongan).

Sejalan dengan itu, disampaikan oleh Bapak Choirul Anhar, S.Ag selaku Kepala Desa Weru Kecamatan Paciran: “...baik dari segi kualitas maupun kuantitas, cuma terkadang persoalan yang belum bisa maksimal adalah terkait pemasaran hasil produksi usaha rumahan di desa Weru ini”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 10.00 WIB di Balai Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Tidak jauh berbeda dari pernyataan di atas, disampaikan pula oleh Bapak Arif Soedjanarta yang menjabat selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, menjelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi keberadaan kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, selain dari potensi perikanan yang tinggi sebaliknya ternyata diversifikasi hasil perikanan tangkap sangat rendah. Hal ini seperti pada kutipan wawancara di bawah ini:

“Lamongan memiliki potensi cukup besar baik dari budidaya maupun tangkap. Rata-rata tiap tahun potensi tangkap mencapai 70.000 ton, budidaya 37.000 ton, perairan umum 3.600 ton. Dari sumber daya manusia rumah tangga nelayan sejumlah 28.154 orang, pendaratan ikan punya 5 *homebase*. Dilihat dari yang *general* itu berarti ada sesuatu potensi besar yang dapat dikembangkan, sekaligus terdapat permasalahan. Permasalahan besarnya hampir 85% ikan hasil tangkapan nelayan itu dijual dalam bentuk

segar, kurang adanya diversifikasi produk. Awal mulanya Balai Besar melihatnya seperti itu, kemudian kami dari dinas menyambut baik dengan dilanjutkannya penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama". (Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 09.41 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Dengan demikian, Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu lokasi kegiatan KIMBis. Hal ini juga dikuatkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) dengan keberadaan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 tertanggal 24 Mei 2012, tentang Operasionalisasi KIMBis untuk Diseminasi dan Pengawasan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 di *Grand Mahkota Hotel* Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data notulensi hasil rapat Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan bahwa penandatanganan dihadiri oleh beberapa SKPD terkait diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda bagian perekonomian, Koperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan masyarakat, Stakeholders terkait, pengurus KIMBis dan Inisiator dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP. Hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 7. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan

Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis Desa Weru

Pada kesempatan lain, KIMBis Kabupaten Lamongan juga telah dikukuhkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungan kerjanya, terjadi dua bulan sebelum Naskah Perjanjian Kerjasama disahkan para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pengurus KIMBis, kunjungan kerja Menteri KP dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2012 yang berpusat di Pondok Pesantren Sunan Drajad, Kecamatan Paciran Lamongan. Menteri KP menyerahkan program-program pembangunan KP baik kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur dan khususnya kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Selain penyerahan program pembangunan, Menteri KP juga mengukuhkan kepengurusan KIMBis Kabupaten Lamongan dengan ditandainya penyematan Pin KIMBis kepada pengurus yaitu Bapak Masrur Hadi sebagai Asisten Manajer Klinik. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Pada waktu itu bapak Menteri KP memang datang ke Lamongan dalam kunjungan kerja, selain menyampaikan program pembangunan KP kepada pemerintah daerah, di waktu yang sama bapak Menteri juga mengukuhkan KIMBis yang ditandai dengan penyematan Pin untuk saya”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 09.15 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Adanya pengukuhan Pengurus KIMBis Kabupaten Lamongan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, memberi isyarat bahwa dukungan dan harapan kementerian KP adanya keberadaan KIMBis cukup besar. Pengukuhan KIMBis Kabupaten Lamongan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Pengukuhan Pengurus KIMBis Oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Pondok Pesantren Sunan Drajad Kecamatan Paciran

Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis Kabupaten Lamongan

KIMBis dibentuk dengan sasaran kegiatannya adalah masyarakat nelayan miskin dan pesisir lainnya yang kehidupannya tergantung dari aktivitas perikanan, buruh nelayan, pengolah hasil perikanan, pedagang pengumpul dan kelompok masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Berbagai program dan kegiatan sektor perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tampaknya menjadi dinamika tak terpisahkan dari tujuan yang hendak dicapai KIMBis. Sehingga untuk melihat penyelarasan

kegiatan, maka identifikasi program dan kegiatan sektor perikanan dan kelautan perlu untuk diperhatikan. Program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan:

Tabel 16. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

No.	Program	Kegiatan
1	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Minapolitan yang berbasis industrialisasi perikanan budidaya • Pengembangan bibit ikan unggul • Pembinaan dan pengembangan perikanan yang meliputi: pelatihan bagi pembudidaya ikan, sarana prasarana dan peralatan laboratorium, rehab BBI.
2	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana P2HP • Peningkatan mutu, sanitasi dan higienitas hasil perikanan
3	Peningkatan produksi garam rakyat melalui pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR)	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan perbaikan sarana prasarana tambak garam • Bantuan bahan aditif untuk perbaikan mutu garam • Pengembangan produksi garam skala rumah tangga bagi perempuan pesisir
4	Peningkatan produksi perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Minapolitan berbasis industrialisasi perikanan tangkap • Pendampingan KUB • Rehab dan pembangunan TPI • Penyempurnaan dan operasional sarana prasarana pelabuhan perikanan
5	Program pelestarian sumberdaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi dan rehabilitasi lingkungan (terumbu karang dan mangrove) • Pengkayaan SDI (pengkayaan laut dan PUD serta apartemen ikan) • Pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan SDI.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan (2013)

Berdasarkan Program di atas dihasilkan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan seperti pada tabel ini:

Tabel 17. Prioritas Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

No.	Uraian	Kegiatan Prioritas
1	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan mandiri • Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara perbenihan ikan yang baik (CPIB) • Pengembangan infrastruktur budidaya • Pengendalian HPI • Penyediaan bahan baku sesuai standar • Pelatihan dan Bimtek
2	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi sarana perikanan tangkap • Perbaikan sistem dan manajemen serta infrastruktur pelabuhan perikanan • <i>Restocking</i> • Penyediaan bahan baku sesuai standar • Pelatihan dan Bimtek
3	P2HP	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksibilitas permodalan dan investasi • Pengembangan sentra pengolahan • Penguatan pemasaran Luar Negeri dan Dalam Negeri • Peningkatan kapasitas penyuluhan dan pendampingan • Pelatihan dan Bimtek
4	KPP/Pesisir dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan usaha bidang perikanan dan kelautan serta pemberdayaan POKMASWAS • Pemberdayaan masyarakat pesisir • Optimalisasi garam rakyat • Rehabilitasi ekosistem dan terumbu karang • Pelatihan dan Bimtek.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan (2013)

Keberadaan KIMBis pada sektor perikanan dan kelautan dengan maksud tujuan dioperasikannya dapat dikatakan masih relatif baru, maka sosialisasi awal kepada masyarakat dan SKPD terkait dilakukan untuk menciptakan interaksi, respon, sekaligus dukungan. Hal ini seperti dengan pernyataan dari Bapak Arif Soedjanarta sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan:

“Dari awal diharapkan ada *support*, dari seluruh SKPD untuk mendukung. Ini diawali dengan pertemuan saat penandatanganan kerjasama antara

Balai Besar Sosial Ekonomi dengan Dinas Kelautan Perikanan, menghadirkan SKPD terkait untuk dilakukan sosialisasi program kerja KIMBis pada Mei 2012 di Hotel *Grand Mahkota* Lamongan. Yang diundang semua hadir diantaranya seluruh *stakeholders*, pengurus KIMBis, kemudian Inisiator dari Balai Besar semuanya hadir, Kepala Dinas beberapa SKPD terkait”. (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 08:58 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan data notulensi hasil diskusi pada saat Naskah Perjanjian Kerjasama ditandatangani dengan dihadiri SKPD terkait, dapat dikatakan bahwa keberadaan KIMBis di Kabupaten Lamongan dengan konsep dan implementasi kegiatan telah mendapat respon dari berbagai kalangan. Hasil diskusi dalam rapat koordinasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18. Hasil Diskusi Rapat Koordinasi dan Sosialisasi KIMBis pada Tanggal 24 Mei 2012

No.	Permasalahan Menurut <i>Stakeholders</i>	Permasalahan Utama
1	Nelayan/Rukun Nelayan (RN)	Perlunya penetapan zonasi wilayah penangkapan; Langkah strategis untuk mewujudkan <i>local branding</i> bidang perikanan; Perhatian kepada nelayan kecil <5GT dalam hal sarana dan prasarana tangkap
2	Kelompok wanita pengolah	Perlunya inovasi teknologi dan peralatan pengolah produk yang efektif sesuai dengan karakter pengolah skala kecil dan rumah tangga. Sosialisasi program-program perlu dilakukan secara lebih luas
3	Dinas Kesehatan	Perlunya sertifikasi PIRT untuk usaha kecil; Pengelolaan kebersihan di lingkungan TPI dan pengolah
4	Bappeda	Perlunya segera disusun zonasi wilayah pengembangan perikanan
5	Koperasi dan UMKM	Banyak penyedia permodalan dengan berbagai skema, namun nelayan/pelaku usaha sulit untuk mendapat akses.

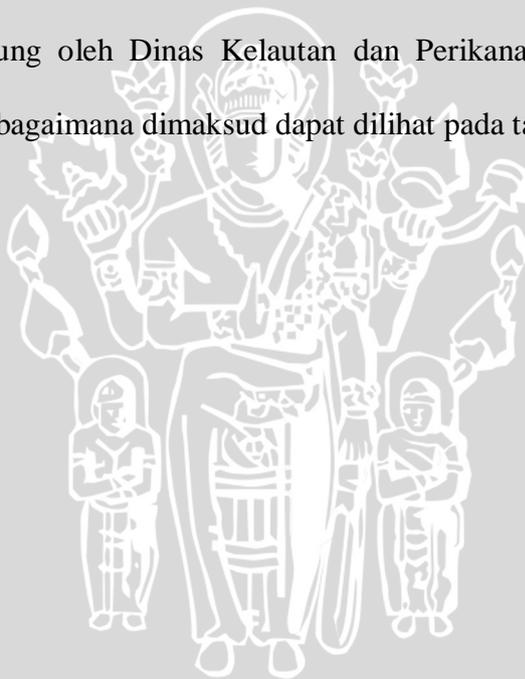
Sumber: Data notulensi hasil rapat pengurus KIMBis Kabupaten Lamongan, 2012 (Diolah penulis)

Desa Weru Kabupaten Lamongan melalui Surat Keputusan dan Naskah Perjanjian Kerjasama ditetapkan sebagai lokasi kegiatan KIMBis. Melalui hal tersebut, maka segera itu dilakukan penyusunan program kerja dengan sasaran utamanya merupakan pemberdayaan masyarakat nelayan. Berdasarkan profil KIMBis Kabupaten Lamongan 2012, tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan KIMBis di awal pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan keberadaan KIMBis pada SKPD dan *stakeholders* terkait;
2. Memfungsikan KIMBis sebagai wadah: pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi KP, pengawalan teknologi dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan mendukung isu strategis pembangunan KP;
3. Membangun deskripsi model kelembagaan penerapan teknologi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Menganalisis dampak keberadaan KIMBis dalam masyarakat.

Berdasarkan rancang bangun kinerja berupa tujuan di atas, mengharuskan pengurus dan pelaksana pusat untuk memperjelas kegiatan selama tahun 2012 dengan dijabarkan dan dilaksanakannya program kerja yang bersangkutan. Melihat wujud kegiatan, kinerja, dan keterlibatan subjek dalam menjalankan KIMBis Kabupaten Lamongan tahun 2012, dapat dikatakan dioperasikannya KIMBis Kabupaten Lamongan ternyata tidak sekadar menjadi tanggungjawab dari pengurus KIMBis Desa Weru. Hal ini juga dapat merujuk kepada Naskah Perjanjian Kerjasama, dijelaskan bahwa selain keterlibatan dan peran Pelaksana

Pusat sebagai unsur pelaksana tugas Badan Penelitian dan Pengembangan KP memiliki otoritas kewenangan dan bertanggung jawab penuh dalam pendirian dan operasionalisasi KIMBis di Kabupaten Lamongan, juga Dinas Kelautan dan Perikanan dengan peran sebagai unsur pelaksana dari tugas Kabupaten Lamongan berwenang dan bertanggungjawab dalam memfasilitasi pembentukan kelompok mitra KIMBis Kabupaten Lamongan. Melalui hal tersebut, dapat dimaknai bahwa peranan dan tanggungjawab utama pada tahun awal berdirinya KIMBis di Kabupaten Lamongan memang masih menjadi tanggungjawab penuh oleh BBPSEKP dan didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Tabel kegiatan KIMBis tahun 2012 sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 19. Kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan Tahun 2012

No.	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Alternatif Solusi	Instansi yang terlibat	Waktu Realisasi
1	Koordinasi dan sosialisasi program dengan pihak Dinas KP Kab. Lamongan	KIMBis belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik dengan instansi terkait	Mensinkronkan program Dinas KP dengan kegiatan KIMBis	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • Dinas KP • Pengurus KIMBis 	Februari/ Maret
2	Survei data dasar lanjutan (sosial ekonomi kelompok sasaran dan kondisi umum biofisik)	Data dasar sosial ekonomi dan biofisik belum lengkap	Survei data dasar lanjutan (sosial ekonomi kelompok sasaran dan kondisi umum biofisik) sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • Dinas KP • Pengurus KIMBis 	April, Juni, September
3	Introduksi teknologi pengembangan produk pada kelompok wanita pengolah produk perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas bahan baku dan produk olahan masih rendah • Kurangnya diversifikasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kualitas bahan baku dan produk olahan melalui introduksi teknologi • Pengembangan diversifikasi produk melalui pelatihan pengembangan produk (misalnya nugget ikan, bakso ikan, kerupuk ikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • BBP4B • Pengurus KIMBis 	April, Juni, September
4	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha produksi dan pemasaran	Kelembagaan usaha dan pemasaran yang masih terbatas	Penumbuhan kelompok melalui penguatan kelembagaan usaha produksi dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • Dinkoperindag • Pengurus KIMBis 	April, Mei, Juni
5	Manajemen keuangan rumah tangga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi perputaran uang yang tinggi di Desa Weru belum disertai dengan baiknya manajemen keuangan usaha rumah tangga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya • Terbatasnya jarak dan waktu 	Inisiasi pelayanan kas keliling yang dilakukan oleh BRI	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • BRI • Dinkoperindag • Pengurus KIMBis 	Mei, Juni

		antara masyarakat nelayan dan pesisir lainnya dengan operasional bank			
6	Inisiasi pembentukan/penguatan Koperasi dalam rangka pemanfaatan dana kelompok nelayan (Blandongan) dan Rukun Nelayan Desa Weru	Dana yang berasal dari hasil tangkap nelayan masih dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi belum dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha produktif	Pengelelolaan dana yang ada dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan usaha melalui pemberdayaan masyarakat dan inisiasi pengenalan lembaga kopersai sebagai wadah kegiatan usaha bersama	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • Dinas UMKM • Pengurus KIMBis 	Juli
7	Pengembangan mata pencaharian alternatif melalui usaha pengelolaan garam rakyat berstandar garam konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya nilai tambah produk garam • Tempat usaha garam yang ada kurang layak • Teknologi dalam hal tempat penguapan/pemasakan garam masih tradisional dan tidak optimal • Kualitas produk masih rendah, pengemasana kurang menarik dan pemasaran terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai tambah melalui produk garam melalui proses pengolahan garam krosok menjadi garam konsumsi • Restrukturisasi usaha dalam bentuk: peningkatan inovasi kelayakan tempat usaha, inovasi pengembangan teknologi penguapan/pemasakan garam, peningkatan kualitas produk, pengemasan dan pemasaran • Penumbuhan dan penguatan kelompok usaha bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Puslitbang Sulap • BBPSEKP • Pengurus KIMBis 	April-Oktober
8	Peningkatan kapasitas masyarakat kegiatan usaha khususnya pemasaran (melalui penjajagan mitra usaha di luar daerah, pameran dan studi banding)	Terbatasnya akses pemasaran kelompok sasaran	Pembentukan jaringan pemasaran diharapkan memberikan kepastian keberlanjutan usaha kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • BBPSEKP • Dinas KP • Pengurus KIMBis • Diskoperindag 	Juli-Desember

Sumber: Profil KIMBis Kabupaten Lamongan, 2012

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan kegiatan komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi yang dilakukan antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktifitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan, dengan KIMBis sebagai wadahnya. Tampaknya dalam perkembangan lebih jauh, KIMBis juga telah mengarahkan kegiatan ini untuk dapat mencapai pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki kehidupan nelayan didukung upaya intervensi dan renovasi paket teknologi Balitbang KP. Oleh sebab itu, selain dari adanya tiga aspek utama yang hendak diadakan penelitian, penelitian ini juga berusaha menemukan tingkat ketercapaian tujuan yang diharapkan dari adanya kerjasama dan renovasi teknologi tepat guna.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) BBPSEKP dijelaskan bahwa kegiatan KIMBis diberbagai daerah diarahkan dan dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut ditekankan bahwa peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui: 1) intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, 2) membangun jaringan kerja, dan 3) renovasi paket teknologi yang diintroduksi.

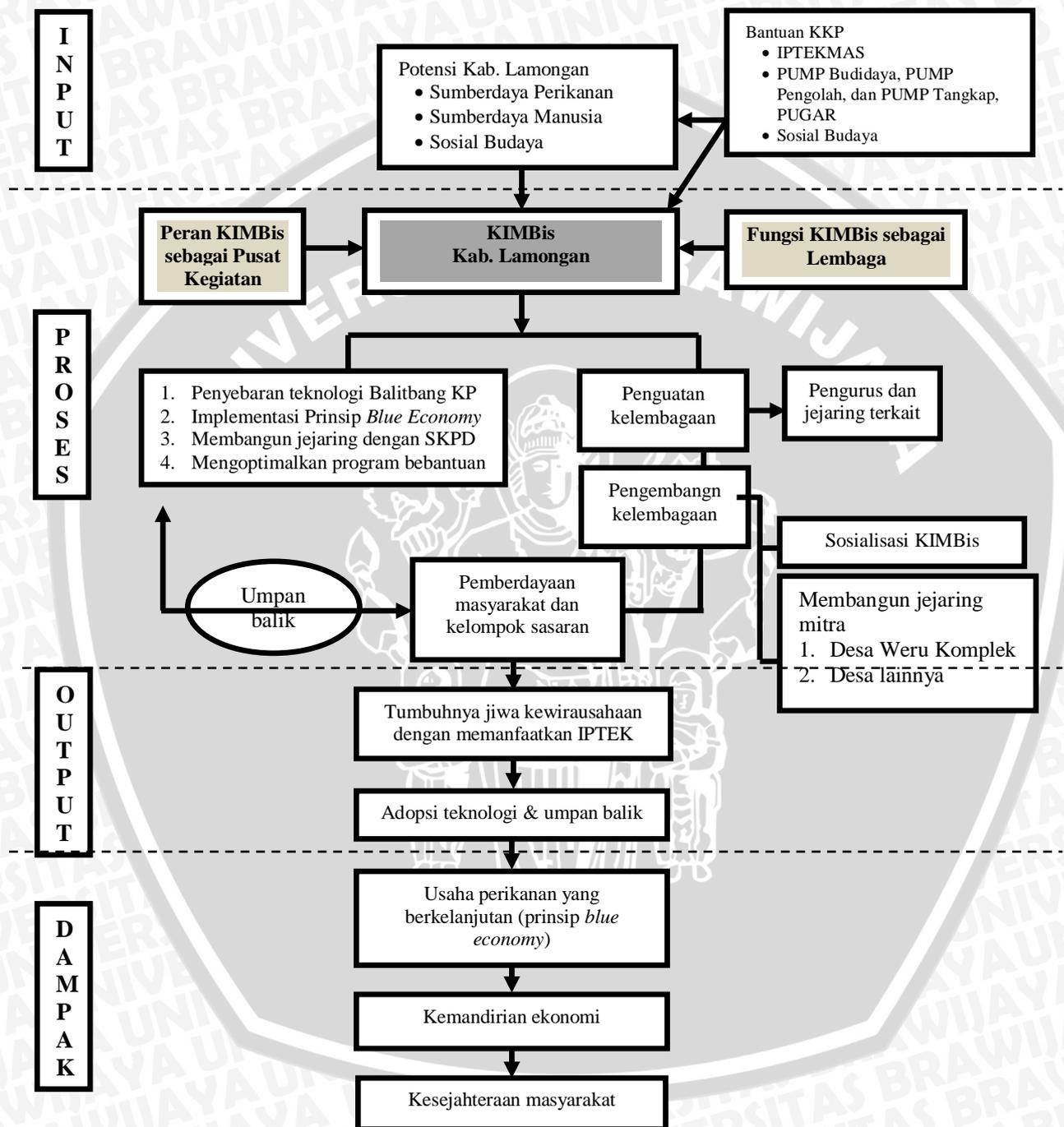
Berangkat dari hal di atas, KIMBis di Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 diarahkan dan berperan sebagai lembaga dan pusat kegiatan. Dengan

demikian, KIMBis sebagai lembaga berarti mampu, mandiri dan memiliki posisi tawar di masyarakat luas, maka dikuatkan dengan berbagai sosialisasi secara berkesinambungan kepada kelompok sasaran, *stakeholders*, SKPD, LSM dan masyarakat luas. Sedangkan KIMBis sebagai pusat kegiatan dilakukan dengan berbagai kegiatan program kerja dengan memperhatikan akselerasi kebijakan dari BBPSEKP yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Percepatan penyebaran IPTEKMAS di Kabupaten Lamongan yang terwujud pada sinergitas dengan Satker Lingkup Balitbang KP;
- 2) Penerapan prinsip-prinsip *blue economy* (BE), yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dan sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan. Pendekatan *blue economy* diimplementasikan dalam bentuk meminimalisasi limbah, kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, inovatif dan adaptif, dan kegiatan KIMBis memberikan efek ekonomi yang luas (*multiplier effect*);
- 3) Membangun jejaring dengan SKPD; dan
- 4) Mengoptimalkan program bebantuan kelautan dan perikanan berupa PUMP dan PUGAR (Profil KIMBis Kabupaten Lamongan, 2013).

Melalui keempat peran KIMBis dalam kapasitasnya sebagai pusat kegiatan, selain menjadi program kerja tahun 2013 juga dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dari BBPSEKP selaku inisiator. Dengan diarahkannya sebagai pusat kegiatan maka dapat menjadi umpan balik sebagai *lesson learned* dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Adapun gambaran kerangka pemikiran

yang sedang dibangun KIMBis Desa Weru Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan adalah seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 9. Kerangka Pemikiran kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan

Sumber: Profil KIMBis Kabupaten Lamongan, 2013

Adanya kerangka pemikiran kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan yang telah digambarkan tersebut, konteks pemberdayaan masyarakat diletakkan di kegiatan utama KIMBis Kabupaten Lamongan dilakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan. Membangun jejaring atau mitra misalnya SKPD terkait maupun sektor swasta yang diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan kegiatan kelompok masyarakat nelayan secara mandiri dilakukan oleh masyarakat, peneliti, dan pelaku usaha secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan tumbuhnya kewirausahaan dengan memanfaatkan IPTEK, diadopsinya teknologi dan diperoleh umpan balik sehingga akan berdampak pada usaha perikanan yang berkelanjutan (sesuai prinsip *blue economy*), terciptanya kemandirian ekonomi dan pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui uraian gambaran kerangka pemikiran KIMBis di Kabupaten Lamongan, maka dapat dimanfaatkan untuk melihat keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru 'Weru Komplek' dan ataupun tingkat ketercapaian harapan yang hendak dicapai.

a. Kegiatan Komunikasi pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Mei 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor 24.1/BBPSEKP/TU.330/2012 ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai salah satu Lokasi/Kabupaten pelaksanaan kegiatan. Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi.

Berdasarkan definisi KIMBis di atas, maka untuk menjalankannya pengurus lokasi yang telah dibentuk dan didukung fasilitator pelaksana tingkat pusat menjabarkan spesifik rangkaian kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan kedalam tiga hal meliputi komunikasi, pendampingan, dan konsultasi. Satu diantaranya adalah proses komunikasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan KIMBis di Desa Weru Kabupaten Lamongan, maka aspek komunikasi menjadi hal penting yang harus dilakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi seperti bagaimana KIMBis dioperasikan, siapa komunikator/pengirim informasi, apa informasi yang disampaikan dan

dikomunikasikan, siapa saja komunikan/ penerima informasi, apa media yang dipakai dalam berkomunikasi dan bagaimanakah efek adanya komunikasi.

1) Siapa/sumber

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, bahwa sejak kegiatan kerjasama dilakukan antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tentang operasionalisasi KIMBis dalam mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan, pihak ataupun sumber yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi adalah BBPSEKP. Hal ini dikarenakan melalui maksud pembentukannya, KIMBis pada pusat-pusat produksi kelautan dan perikanan diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terutama mendorong percepatan peningkatan produksi, mendukung pengembangan industrialisasi perikanan, mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebagai salah satu *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan. Hal ini seperti disampaikan Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...kami berusaha melakukan pembantuan kepada Balai Besar Sosial Ekonomi berupa penjangkaran kebutuhan teknologi inovasi, serta melihat kesesuaian usulan penerapan inovasi teknologi dari Balitbag KP jauh sebelum pelatihan digelar. Sebelum KIMBis memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pusat, biasanya kami lakukan survey dengan melalui pendampingan. Seperti di kelompok-kelompok budidaya lele, itu kemarin kami latihkan pembuatan pakan dengan bahan baku alternatif, ide gagasannya berasal dari Balai Besar Sosial Ekonomi pusat. Kemudian di kelompok-kelompok garam misalnya kelompok Sarem Makmur kami lakukan pembinaan pemurnian garam pun didukung pemikiran Balai Besar dengan menerapkan teknologi tepat guna garam terpal, sekaligus pengemasan juga tidak luput kami dampingi”. (Wawancara pada tanggal

22 Agustus 2014, pukul 09.50 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Stakeholders merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan KIMBis. Dengan demikian, identifikasi *stakeholders* menjadi hal yang perlu diperhatikan, dengan maksud agar menjadi penjelas dari serangkaian *stakeholders* terkait dan berinteraksi dengan kelompok nelayan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan, Bapak Arif Soedjanarta menjelaskan bahwa yang termasuk dalam *stakeholders* terkait dalam kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan, diantaranya adalah 1) Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan peran pendukung kegiatan; 2) Pemerintah Pusat adalah Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan sebagai inisiator sekaligus penanggungjawab kegiatan; 3) HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan RN (Rukun Nelayan) sebagai pendorong dalam kegiatan; 4) Tokoh masyarakat; dan 5) Kelompok-kelompok masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang diberdayakan. Komposisi *stakeholders* tersebut merupakan anjuran dari pelaksana pusat dan telah mengalami perkembangan berdasarkan kondisi di lapangan. Hal ini sebagaimana argumentasinya dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“*Stakeholders* dalam kegiatan KIMBis ini diantaranya meliputi Pemerintah daerah: kecamatan dan desa. Pemerintah pusat adalah Balai Besar sebagai inisiator. Kemudian Pemerintah Kabupaten, HNSI, RN, tokoh masyarakat lalu kelompok pembudidaya, pengolah, penyuluh, kelompok garam dan masyarakat sasaran tempat studi kasus. Ini dari pusat yang menentukan, tapi ada pengembangan dari Dinas sendiri yaitu kelompok pembudidaya dan kelompok garam dengan alasan melihat kondisi lokasi setempat”.

(Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 08.32 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Hal yang berbeda dengan pernyataan di atas disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha yang menjelaskan bahwa susunan stakeholders yang sejauh ini terlibat pada kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan adalah seperti pada kutipan di bawah ini:

“Melihat keterlibatannya selama ini. Saya melihat stakeholders itu adalah kelompok blandongan (kelompok nelayan) yang itu biasanya terdiri dari kelompok pengolah, garam dan pembudidaya, kemudian dengan pelaku-pelaku usaha. Termasuk dengan lembaga-lembaga di Desa yang ada hubungannya dengan nelayan dan peningkatan perekonomian. Lalu penyuluh Kabupaten Lamongan dan Dinas Kelautan Perikanan, kami biasa dan sering berkoordinasi. Itu yang kemudian menjadi stakeholdersnya”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.45 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Adanya perbedaan penyampaian kaitannya dengan keterlibatan stakeholders terkait pada kegiatan KIMBis yang semestinya sebagai *partner* dalam berkomunikasi terhadap masyarakat kelompok nelayan, maka dapat dikatakan terjadi *Missed Communication* antara pelaksana lokasi dengan pelaksana tingkat pusat dalam memaknai pentingnya stakeholders dalam mengambil peran berharga pada pelaksanaan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak dibuatnya susunan pelibatan stakeholders-stakeholders di KIMBis Kabupaten Lamongan.

Melalui hal tersebut, dalam berkembangnya KIMBis dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Weru, maka keseluruhan komunikasi saat ini dipegang oleh pengurus KIMBis pribadi. Melihat itu, komunikasi dalam keseluruhan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis KIMBis, disebutkan dimana

Liaison Officer (LO) adalah tenaga yang berperan sebagai informan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha, dijelaskan bahwa merujuk pedoman teknis pelaksanaan, sebenarnya yang menjadi penghubung dan *Public Relation* (PR) dalam memberikan informasi adalah *Liaison Officer* (LO), sehubungan dengan hal tersebut manajer KIMBis sejak awal telah menjabat sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Paciran serta merangkap sebagai penyuluh untuk wilayah Paciran dan Brondong, sehingga komunikasi stakeholders sering terjadi dalam aktivitasnya walaupun tidak berada di sekretariat KIMBis. Hal ini sebagaimana pernyataan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Semestinya *Liaison Officer* (LO) nya yang bertugas membagi dan penghubung berbagai informasi, karena manajer ini juga penyuluh Kecamatan Paciran dan Brondong jadi lebih enak hubungannya kalau ada perlu dikomunikasikan. Manajernya ini juga merangkap sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.24 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Aktivitas komunikasi dan koordinasi pada lingkup stakeholders secara rutin dan lebih sering terutama bagi pengurus KIMBis, Penyuluh, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, secara kontinyu terjadi setiap bulan, sehingga aspek keterlibatan stakholder lain tidak nampak dari adanya aktivitas komunikasi secara rutin. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Suyuh Khoriri sebagai *Liaison Officer* (LO) Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Setiap bulannya ada rapat dan koordinasi antara KIMBis, Penyuluh dan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setiap awal bulan, jadi disana kami *sharing* misalnya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing

penyuluh barangkali itu bisa kami sampaikan ke pusat atau juga bisa ditawarkan menu pelatihan di wilayah dampungannya itu”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.47 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

2) Pesan

Nilai inovasi ataupun teknologi dalam proses pemberdayaan di KIMBis sebenarnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*), bagaimana kelompok mau berserikat sebagaimana nilai yang dijunjung tinggi dari adanya pemberdayaan, sehingga produk-produk inovasi dan teknologi aplikasi tidak dapat dikatakan sebagai nilai akhir dalam sebuah proses pemberdayaan di KIMBis. Terlebih dari itu, KIMBis adalah *role model* pemberdayaan yang dioperasikan sebagai penghubung hasil penelitian dan penerapan teknologi. Hal ini seperti disampaikan dari Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...teknologi pengertiannya kalo awal itu dia itu bagaimana masyarakat mau memecahkan apa yang menjadi masalahnya, selanjutnya kepada itu lanjutan, kalo diukur ya misalnya kalo teknologi paling tidak dia memahami tentang cara pengolahan ikan yang baik, memahami diterapkan atau tidak memang ada yang belum, dia memahami cara pengolahan yang baik kalo bahasa sini dia menggunakan *celemek*, apakah disana sudah dilakukan yang saya lihat ya masih belum, dia kan dilatih dia harus menggunakan sepatu, *celemek*, topi. Produk penelitian yang dimaksud di KIMBis itu bukan hasil penelitian loh ya, *role model* pemberdayaan”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 10.25 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

KIMBis Desa Weru dalam kegiatannya merupakan bagian dari program peningkatan kehidupan nelayan yang dilakukan pada konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, komunikasi pada penyebarluasan informasi teknologi dan

inovasi dilakukan baik lingkup pelaksana pusat kepada pengurus KIMBis maupun pengurus KIMBis kepada kelompok masyarakat nelayan. Selain itu, dalam memfasilitasi kelompok-kelompok untuk memakai ataupun menerapkan paket teknologi, maka pengurus KIMBis selain berperan sebagai fasilitator, juga diterapkannya skala prioritas kebutuhan kelompok tersebut. Berdasarkan penjelasan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha, aktivitas komunikasi secara keseluruhan dibangun pada KIMBis Desa Weru relatif dinamis tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Jadi proses awal KIMBis dan pengurus terbentuk di Desa Weru, selanjutnya dilakukan proses pengenalan keberadaan KIMBis bisa formal juga sebaliknya dan program kerja yang dinaungi klinik. Jadi memang aktivitas komunikasi penyebarluasan inovasi hasil riset ini tidak secara berkala terjadi di sekretariat klinik dan karena sifatnya memang wadah ini sebagai fasilitator sehingga kebutuhan kelompok yang bisa kami fasilitasi bisa diajukan secara prioritas, dan ada inovasi-inovasi teknologi dari pusat yang digunakan di wilayah dan kelompok desa Weru ini semua disalurkan melalui pelatihan-pelatihan”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.10 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Konteks intervensi teknologi dan inovasi hasil riset yang disebarkan kepada kelompok masyarakat nelayan, alur komunikasi yang dilakukan pengurus KIMBis sebagai fasilitator menjadi hal yang sangat penting, hal ini berkaitan ataupun menentukan tercapai atau tidaknya kebutuhan dan kepentingan teknologi. Dijawabnya kebutuhan kelompok masyarakat nelayan di Desa Weru terkait teknologi tepat guna yang menjadi solusi teknologi inovasi.

Perlu diperhatikan, upaya penyebarluasan teknologi ataupun inovasi yang dibutuhkan dan sedang dicapai oleh Balibang KP ternyata belum dilakukan di Desa Weru, namun dilakukan di wilayah sekitarnya ini dilakukan untuk mengawal dan menciptakan perubahan kebudayaan tradisional masyarakat nelayan kearah modernisasi dan industrialisasi perikanan dan kelautan. Untuk yang desa Weru karena pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan dikawal pengurus KIMBis, maka sesuai *road map* BBPSEKP pada tahun 2015 KIMBis di Kabupaten Lamongan dilepas secara bertahap, dan sejauh ini inovasi yang berupa akademis maupun teknis tidak seluruhnya didapatkan dari BBPSEKP, akan tetapi pengurus KIMBis lah yang mengembangkannya. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...ya ndak keseluruhan dari pusat, dari pusat itu cuma sekedar dananya berapa, waktunya kapan itu diambilkan dari pusat diberikan ke KIMBis, KIMBis bagi ke yang lain, KIMBis yang ngembangkan itu sejauh ini. Balai besarnya cuma memberikan satu pengalaman, terus tujuan KIMBis sendiri kan pendampingan kepada ibu-ibu nelayan yang dulunya itu dari wilayah pesisir sekarang larinya harus ke wilayah Lamongan. Secara perlahan dilepas, 2015 ini harus mandiri, yang pastinya tidak ada anggaran yang dari sana, pusat itu tidak memberikan anggaran dan apapun, jadi kami memberikan pelatihan itupun mandiri, sifatnya dari sana mendatangkan kami kalo KIMBis ada bisa cuma memberikan pengetahuan kepada mereka”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.30 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Sejauh ini, dalam rangka intervensi teknologi inovasi, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (BBPSEKP) bekerjasama dengan teman Balai Besar yang lain sebagai mitranya, misalnya fokus terhadap mutu maka Balai Besar yang berkaitan dengan mutu dihadirkan ke lokasi studi. Hal ini

sebagaimana disampaikan Bapak Suyuh Khoriri sebagai *Liaison Officer* (LO) Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan berikut:

“Pada saat penerapan teknologi, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi datang dengan pihak Balai Besar lain, pernah mengenai mutu waktu itu Balai Besar mutu didatangkan ke Desa Weru untuk mengidentifikasi dan mengadakan pelatihan serta memahamkan masyarakat. Terus juga pernah datangkan pihak Balai Besar lain untuk pengelolaan industri garam di wilayah Sedayu Lawas dan pihak lain berkompeten didatangkan untuk melatih pada kelompok-kelompok garam tersebut. Dalam hal teknologi yang dibutuhkan kelompok masyarakat nelayan bisa terjadi lantaran inisiatif dari pusat dan kami juga melakukan langkah prioritas kebutuhan kelompok pada penjangkaran di lokasi pelatihan”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal alur ataupun mekanisme penyebarluasan teknologi dan inovasi terdapat dua model alur komunikasi yang dilakukan. Pertama, inisiatif dari pusat (BBPSEKP). Dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian dan kebutuhan yang pada akhirnya mampu dilakukan masyarakat dan memperoleh hasil. Kedua, hasil prioritas pengurus (KIMBis Desa Weru). Dari sekian kegiatan pelatihan yang dilakukan selanjutnya diadakan penampungan berbagai aspirasi dari kelompok-kelompok dengan perkiraan kebutuhan peralatan, teknologi apa yang sedang dibutuhkan terhadap peningkatan produksi, mutu, dan ataupun kualitas. Selanjutnya dilakukan komunikasi dengan pihak pelaksana pusat. Ketika mekanisme pemenuhan kebutuhan teknologi inovasi ini terjadi dengan memperhatikan keterlibatan, penjangkaran, dan hasil komunikasi kelompok-kelompok nelayan di kegiatan pelatihan-pelatihan, hal selanjutnya adalah dilakukannya skala prioritas dan KIMBis berperan sebagai fasilitator pengajuan

kebutuhan misalnya inovasi teknologi dan alat yang dapat dikembangkan dikelompok tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara berikut:

“Setelah dilakukan identifikasi melalui cara pendampingan, kebutuhan kelompok-kelompok itu apa, permasalahannya seperti apa, dan kesesuaian itu bagaimana dengan melihat ketersediaan waktu, KIMBis baru mengkomunikasikan ke pelaksana pusat (BBPSEKP) dan sumber teknologi seperti bantuan dari Dinas”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Dalam konfirmasinya, Ibu Hindun Janariyah selaku pelaku usaha, membenarkan adanya upaya penjarangan kebutuhan teknologi oleh kelompok diketerlibatannya pada Kegiatan KIMBis, dalam kutipan wawancara berikut: “...iya, ada, usulan dari ibu-ibu warga desa Weru dulu masalah alat, karena ibu-ibu pengolah seperti pembuatan produk agar cepat dan dapat digunakan bareng-bareng”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 08.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

3) Untuk siapa/penerima

Keberadaan komunikasi dan interaksi diantara kelompok masyarakat nelayan di daerah pesisir dengan stakeholders terkait diharapkan terwujud kemandirian kelompok masyarakat nelayan yang dinamis dan berkelanjutan. Kelompok masyarakat nelayan yang menjadi kelompok sasaran dari KIMBis di Kabupaten Lamongan ini adalah penduduk Desa Weru “kawasan Weru komplek” sebagai masyarakat pesisir yang aktivitas usahanya berhubungan langsung dengan

sumber daya perikanan. Aktivitas usaha perikanan tersebut antara lain nelayan, pedagang, dan pengolah ikan (pelaku usaha).

Keberadaan KIMBis Desa Weru agar setiap informasi dapat tersampaikan dan terjadi timbal balik kepada kelompok nelayan dalam setiap kegiatan, maka pengurus klinik berupaya memaksimalkan media penunjang diantaranya bersifat formal dan informal baik melalui media cetak, *handphone*, internet sekalipun tidak maksimal, dan lebih sering melalui tatap muka. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Dalam setiap kegiatan KIMBis, kita undang kelompok-kelompok binaan untuk datang, biasanya melalui komunikasi *handphone*, dihubungi saja karena tidak mau jadikan ini terlalu formal dan biasanya kalau ketemu salah satu anggota, terus disampaikan ke ketua kelompoknya ataupun bagi pelaku usaha perorangan. Internet sudah tapi tidak kontinyu fungsinya dimaksimalkan, pernah juga ada pelatihan pembuatan blog bagi kelompok yang terlibat. KIMBis juga punya blog sebenarnya tapi tidak lanjutnya masih kurang”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.10 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Keberlanjutan dari kegiatan KIMBis baik berupa pelatihan-pelatihan dan pendampingan diharapkan terwujudnya masyarakat nelayan yang mandiri dan mampu mengorganisir kepentingan dan kebutuhan mereka bersama dengan *stakeholders* yang difasilitasi oleh pengurus KIMBis dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pernyataan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha, disampaikan bahwa *feedback* kelompok nelayan dari sekian kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan dinilai kurang, adanya resistensi masyarakat dan keaktifan mengakibatkan keberlanjutan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok

tidak maksimal, komunikasi dua arah terjadi ketika kegiatan berlangsung saja. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Saya melihatnya begini, jadi masyarakat itu sifatnya pasif. Kami pun juga berharap ada respon dari masyarakat nelayan kawasan Weru Komplek ini misalnya punya masalah usaha pengolahan lalu datang ke kami untuk komunikasi itu yang masih sangat rendah seperti itu, setelah ada pelatihan terhadap kelompoknya silahkan berkonsultasi jika belum bisa dipraktekkan, termasuk di sekretariat. Tapi beberapa diantara kelompok binaan juga berinteraksi ke sekretariat, cuma ini perwakilan biasanya”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Pada kesempatan lain, juga disampaikan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan bahwa motivasi warga desa Weru cenderung menganggap kegiatan KIMBis tidak menguntungkan dirinya dan produk olahan berupa krupuk kurang menarik, hal ini pada kutipan di bawah ini:

“...mulai dari kalo belum ada usaha, saya tunjukkan seperti siripnya ikan itu bermanfaat digunakan untuk ini, dibuat makan ini, lha sayangnya sendiri untuk orang Weru kan tidak semuanya bisa melakukan itu, dari ibu-ibu yang dulunya belum punya usaha selanjutnya diajak untuk ikut berusaha, *feeling*-nya ah sudah banyak yang jualan krupuk”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.30 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

4) Saluran/media

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan di lapangan, sejauh ini aktivitas komunikasi kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan dilakukan lebih banyak dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Masyarakat misalnya kelompok sasaran dan binaan KIMBis, bahkan masyarakat umum relatif berkesempatan dan bertatap muka untuk berkomunikasi terutama dalam bentuk kegiatan pelatihan yang sedang berlangsung, namun beberapa kesempatan juga dilakukan tidak

formal di saat waktu, tempat bertemu dengan pelaku usaha, juga didalam sekretariat KIMBis desa Weru dengan dapat berkonsultasi bersama pengurus KIMBis. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara berikut:

“Setiap kegiatan diadakan, contohnya pelatihan dan pembinaan artinya masyarakat yang langsung kami bina, mereka hadir dan responnya positif, tingkat kehadiran hingga 90%. Praktek ditempat juga kami fasilitasi dan mampu mengolah misalnya *nugget*, kerupuk ikan, tempura, bakso. Pada prinsipnya adalah *dari-oleh-untuk* masyarakat sesuai buku petunjuk KIMBis. Kegiatan yang kami lakukan ini sifatnya bisa diikuti oleh semua, cuma memang kami mulai dari kelompok-kelompok, kalau diluar itu mau gabung di kegiatan dan main-main ke klinik *monggo*, beberapa kali juga dilakukan *sharing* di kantor dan di jalan maupun di laut”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 11.15 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Pada saat awal KIMBis beroperasi di desa Weru, kegiatan pelatihan dimulai dari lingkup RT di desa Weru, kemudian ke kawasan Weru kompleks hingga saat ini ke wilayah kabupaten Lamongan. Hal ini seperti disampaikan dari Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Tidak semuanya saya ambil, yang saya ambil itu per RT karena banyak sekali agar tidak terjadi kecemburuan sosial jadi saya ambil per RT, awalnya gitu jadi saya mulai dari Weru dulu terus ke Sidokumpul untuk Weru kompleknya, selanjutnya ke Waru Lor itu binaanya kami mulai dari RT 1, RT2, RT3, berikunya lagi dari RT 4 hingga RT sekian, itu bergilir, setelah itu jadi satu, mereka-mereka itu terbentuk kelompok terus dijadikan satu kami mengambil narasumber dari Jakarta itu di failitasi KIMBis yang ada di sana”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 08.55 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa komunikasi terbangun relatif bersifat dalam ruang lingkup pada kegiatan pelatihan. *Stakeholders* terkait dihadirkan pengurus untuk memberikan materi sesuai tema pelatihan dengan mekanisme diundang dan sebagai narasumber tergantung tema/materi yang diminta kelompok nelayan atau kelompok masyarakat. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan keterlibatan peran masing-masing *stakeholders* dengan konteks komunikasi lebih mengikuti situasi kegiatan dan aktivitas pelatihan berlangsung. Hal ini seperti disampaikan dari Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Lihat pelatihannya, misalnya pengolahan pernah kami datangkan dari pusat yaitu Ibu Murni dari Balai Besar. Kemudian budidaya menghadirkan langsung pelaku usaha sudah sukses di budidaya, ditema garam menghadirkan dari penyuluh dan orang sukses di bidang garam. Pelatihan cabut duri bandeng mengundang narasumber dari Gresik memang pelaku usaha bergerak dan berhasil di bidang itu. Kalau pelatihan-pelatihan yang ringan kami bisa *handle*, ya digelar dari kami sendiri. Namun secara umum setiap pelatihan, kami yang berperan sebagai panitia utama”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 11.25 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Ruang lingkup komunikasi KIMBis Kabupaten Lamongan biasa terjadi pada kegiatan pelatihan, dengan demikian media utama komunikasi diantara kelompok masyarakat nelayan dengan *stakeholders* terkait adalah dilakukan melalui pelatihan. Materi/pesan yang disebarkan ataupun dibahas pada kegiatan pelatihan biasanya terkait permasalahan isu-isu terkini sektor perikanan dan kelautan, peningkatan kualitas produksi, pengembangan sumber daya perikanan, dan diversifikasi hasil perikanan menjadi produk beraneka ragam bernilai

ekonomis dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah (*Value added*) hasil perikanan. Pada saat kegiatan berlangsung masyarakat antusias dan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi meliputi berbagai generasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Komunikasi pada kegiatan pelatihan diantara kelompok Nelayan, Stakeholders dan Pengurus KIMBis

Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis Desa Weru

Pelatihan-pelatihan dilakukan kepada kelompok masyarakat nelayan, sejauh ini dilakukan kepada kelompok binaan KIMBis dan ataupun secara umum juga dilakukan kepada kelompok masyarakat umum yang berkeinginan meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk perikanan, dengan mengundang pengurus KIMBis menjadi narasumber dan pendamping. Sesuai hasil wawancara dan melihat uraian teknis kegiatan hingga tahun 2014, KIMBis Desa Weru telah banyak berkesempatan untuk memberikan pelatihan dan sebagai narasumber diberbagai kegiatan baik yang bersifat tidak formal seperti

memberikan pelatihan terhadap kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan di luar lokasi studi maupun secara formal yang diadakan instansi pemerintahan Kabupaten Lamongan. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan bahwa KIMBis telah beberapa dalam kutipan wawancara berikut ini:

“KIMBis pernah diundang dalam kegiatan Diskoperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan. Kalau pelatihan kepada kelompok masyarakat, KIMBis sudah ke Kecamatan Kalitengah, Karanggeneng, dan Brondong ke kelompok pengolah di Desa pada Kecamatan tersebut, kalau ke budidaya pernah ke Kecamatan Paciran, Karangbinangun, Glagah, dan Maduran”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10.25 WIB di Sekretariat KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Lamongan).

Selain komunikasi dua arah dilakukan terutama pada saat pelatihan baik kepada kelompok masyarakat nelayan maupun masyarakat luas. Masyarakat juga berkesempatan didampingi pengurus KIMBis Desa Weru dan narasumber untuk melakukan praktek pengolahan di lokasi kegiatan pelatihan. Adapun gambar dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 11. Praktek Pengolahan Hasil Perikanan

Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis Desa Weru

Fokus kegiatan berupa pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang dilakukan KIMBis Kabupaten Lamongan selama pengamatan di lapangan adalah pada aspek pengolahan dan pemasaran. Hal ini dikarenakan Desa Weru masih banyak memiliki keterbatasan, namun sebaliknya terdapat potensi besar yang dapat diambil. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Arif Soedjanarta sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Kabupaten Lamongan:

“Kegiatan ini hadir untuk menjawab permasalahan kelautan perikanan. Sebetulnya berdasarkan konsep perdagangan, harga ditentukan produsen. Produk perikanan ditentukan oleh pedagang, itu kelemahannya. Kelemahan itu berarti para jasa perantara amat sangat menentukan. Kalau itu diungkit berarti di pra hingga produksi, namun amat sulit dilihat karena punya kebiasaan/ *behaviour*. Selama ini Desa Weru potensi kapalnya <5GT, berubah menjadi besar pun juga sulit, kemudian *one day fishing* satu hari pulang, kondisi kalau cuaca buruk itu juga gak bisa ke laut dan alat tangkap terbatas itu juga tidak bisa menjangkau ke daerah lebih luas. Dari keterbatasan itu maka diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan teman-teman KIMBis pada sektor pengolahan dan pemasaran. Jadi, harapan pertama sasaran kegiatannya ada di ofvam, jadi ofvam itu secara langsung bisa dilihat, mengapa KIMBis cari di ofvam karena ada nilai tambah secara langsung, bisa dirasakan secara langsung, bisa secara mudah itu dipelajari, orang membuat bakso kan bisa dipelajari, tapi kalo onfam kan sulit harus melalui proses yang panjang. Jadi semua yang berkebutuhan dibidang kelautan itu KIMBis bermaksud di dalamnya cuma sebagai pemicu supaya ini bisa diterima oleh masyarakat jadi ini yang bisa dikerjakan, berarti indikatornya bisa diukur, mengapa pengolahan di dahlukan seperti itu. Dan ini sebenarnya Desa Weru itu memiliki banyak usaha pengolahan selama ini masih belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Jadi kalau pengolahan dan pemasaran disentuh maka bisa bergeliat ekonominya, tidak hanya melihat pasar diluar weru kompleks tapi pasar di dalam weru kompleks sendiri produk mereka terserap. Kalau produk itu terserap kami yakini mampu meningkatkan produktifitas nelayan. Harapannya seperti itu, kami taruh dulu di pengolahan dan pemasaran jadi ada pelatihan-pelatihan”. (Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 09.15 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Dalam rangka menjalankan kinerjanya, KIMBis Kabupaten Lamongan juga mendapat dukungan penuh dari Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini seperti disampaikan Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dengan menjelaskan bahwa Penyuluh yang terlibat di kegiatan KIMBis ini seluruh penyuluh yang berjumlah 12 orang, ini penyuluhnya Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat nelayan dan lainnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Penyuluh terlibat dalam kegiatan KIMBis tidak hanya di kawasan Kecamatan Paciran, namun juga di luar Kecamatan yang menjadi lokasi KIMBis ini, tergantung dimana lokasi acara berlangsung, mereka kami undang ataupun sebaliknya kami diundang untuk memberikan pelatihan pada wilayah kewenangannya ditempatkan. Diharapkan kegiatan kami ini mampu menjangkau wilayah se-Kabupaten Lamongan. Kami saling memberi informasi mengenai isu apa yang saat ini menjadi permasalahan kelautan perikanan, secara timbal balik komunikasi itu terjadi”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

5) Dampak/efek

Sejauh ini, wujud inovasi teknologi yang telah diterapkan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (BBPSEKP) di kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan, terdiri dari:

1. Sertifikasi PIRT untuk pelaku usaha, dikegiatananya meliputi cara pengolahan yang baik, penerapan pengolahan mulai dari bahan baku hingga

- pemasaran, pemilihan bahan baku olahan, dan upaya menerapkan prinsip *blue economy* pada setiap proses produksi,
2. Upaya peningkatan kualitas garam tradisional dan inovasi pakan alternatif untuk budidaya ikan lele,
 3. Gagasan modernisasi alat pengolahan dari tradisional ke modern, meskipun dalam hal ini dari BBPSEKP belum dilakukan, dan
 4. Teknik pemasaran melalui *website*.

Ketika BBPSEKP datang dengan membawa inovasi secara bersamaan dilakukan koordinasi penyampaian kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengurus KIMBis Desa Weru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan:

“...paket teknologi, berbagai teknologi olahan yang dibawa kesini, pengolahan yang baik, bahan baku hingga pemasaran *online*, pemilihan bahan baku olahan, dan menerapkan prinsip *blue economy*, pakan budidaya alternatif, peningkatan kualitas garam tradisional, kemudian pemberdayaan kelompok, pengembangan jiwa wirausaha itu kan yang inisiasi sana semua ini peneliti, yang diselaraskan dengan program KIMBis, gagasan modernisasi teknologi pengolahan, pemberdayaan kelompok, pemahaman tentang kelompok usaha kemudian pemasaran semuanya diselaraskan oleh pihak peneliti. Secara bersamaan diadakan koordinasi dari Dinas dan pengurus KIMBis”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Sejauh dari hasil temuan di lapangan dan wawancara dengan pengurus KIMBis, dijelaskan bahwa teknologi berupa kebutuhan peralatan fisik guna menunjang kelangsungan produksi pengolahan hasil tangkap di kelompok-kelompok nelayan binaan dan ataupun pelaku usaha di Desa Weru memang belum nampak, beberapa kesempatan bahkan didapatkan dari sumber lain walaupun

dalam kaitannya mendukung KIMBis. Namun, yang sifatnya ide, gagasan, formula, dan inovasi sebagian besar penerapannya berasal dari BBPSEKP selaku pihak pelaksana pusat dan dikembangkan kepengurusan KIMBis pada peran pendampingan. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha pada kutipan wawancara dibawah ini:

“Jadi, untuk teknologi fisik dari pusat (BBPSEKP) sejauh ini belum nampak diterapkan sepengetahuan kami. Tapi pernah itu kelompok dapat dari Kabupaten dan Propinsi, ya kami prioritaskan kepada kelompok yang berhak. Begini, misalkan seperti alat pada kelompok budidaya lele untuk membuat pakan bahan baku limbah itu kebetulan di Propinsi ada, kami sampaikan itu ke Propinsi. Kemudian kelompok pengolahan yang dapat itu kebetulan di kasih dari Kabupaten untuk dukung KIMBis ini”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.27 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Berkaitan dengan hal tersebut, teknologi berupa inovasi dimanfaatkan pada pelatihan-pelatihan dalam rangka penyebarluasan informasi inovasi sebagai peningkatan nilai tambah maupun dalam menjaring aspirasi dari kebutuhan masyarakat dilihat dari potensi dan kekurangannya, pengurus KIMBis lebih banyak melakukan transfer informasi secara timbal balik dengan BBPSEKP selaku pelaksana tingkat pusat, berupa formula, anggaran kebutuhan kegiatan, inovasi, gagasan, ide, kerangka pikir, dan cara dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas masyarakat nelayan dilihat dari potensi dan keberlanjutannya yang berbasis IPTEK. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Dalam banyak hal memang ide-ide, gagasan pemikiran mengenai inovasi itu dari pelaksana pusat (BBPSEKP), dalam beberapa kesempatan ada koordinasi antara kami dengan pusat untuk mencetuskan kegiatan dan rancangan ke depan. Untuk pelatihan dari Balai Besar pernah dilakukan sekali di balai Desa Weru. Inovasi-inovasi dari mereka (BBPSEKP) pun secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan dari KIMBis dalam menyampaikannya ke kelompok-kelompok. Setiap kegiatan pelatihan gagasannya ya dari pusat, lalu kami teruskan ke kelompok-kelompok, kalau sesuai pengolahan ya ke pengolahan dan seterusnya atau kita bisa mengajukan ke pusat jika ditawarkan sesuatu kebutuhan dari masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.15 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat hal tersebut keberadaan peran dalam kebertanggungjawaban BBPSEKP (pelaksana pusat) secara umum masih dijalur perlintasannya, artinya inisiator tetap berkomitmen dan bertanggungjawab dalam kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Memang dalam banyak hal inovasi rekayasa teknologi (wujud fisik teknologi) belum disebarluaskan kepada kelompok masyarakat nelayan di kegiatan KIMBis, namun teknologi non fisik yang sifatnya ide, inovasi, gagasan menjadi kata kunci introduksi dan renovasi sejauh yang diamati di lapangan lokasi pelaksanaan KIMBis Desa Weru Kabupaten Lamongan.

Dampak dari kegiatan KIMBis sejauh ini masyarakat telah menjadi tahu mengenai wirausaha, yang sebelumnya tidak memiliki usaha, hingga penjualan mencapai 25 Kg setiap 3 hari dengan harga per Kg 25 ribu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hindun Janariyah selaku pelaku usaha, juga termasuk yang mendapatkan PIRT, dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Perkembangan usaha, bikin krupuk, sebelumnya gak jualan krupuk, ikut KIMBis malah diberikan pengetahuan bikin krupuk, jadi lebih baik, dapat pengalaman. Alhamdulillah perkembangannya baik, lancar, dijual di sini, dari Brondong ke sini, dari Tuban mantri-matri suntik juga ke sini. 3 hari sekali 25 kg. Sudah punya langganan ada dari Malang, Tuban, lokal di Kranji, Brondong, Paciran. harga 1 kg 25 ribu”. (Wawancara pada tanggal

23 September 2014, pukul 08.35 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Selain efek secara kognitif dimana seseorang menjadi lebih tahu sesuatu, juga telah berproses kepada terbentuknya sikap. Hal ini sejalan dengan Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...dulu memang warga sini sudah ada beberapa usaha ini tapi gak sebegini, bermula dari KIMBis jadi bagus. Pengetahuan, lebih higienis, yang dulunya ndak tahu yang namanya STTP (campuran produksi olahan), *baking powder*, *baking soda*, dulunya itu belum tahu kalo kerupuk itu dikasih telur, terus pemotongnya itu masih menggunakan tangan, pengepres pakai api, sekarang kan pakai alat lebih enak, alatnya beli sendiri jadi tiap pelatihan kan ditunjukkan, lalu beli sendiri alat dengan alat yang sama”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 08.40 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Lain dari pernyataan secara teknis, pengamatan pemerintah desa Weru sejauh ini melihat perkembangan adanya kegiatan KIMBis lebih dapat meningkatkan kualitas kuantitas produk. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Choirul Anhar, S.Ag selaku Kepala desa Weru Kecamatan Paciran: “Jadi sejauh amatan desa, perkembangannya setiap kegiatan baik terkait masalah krupuk ikan dan kegiatan lain ya lebih profesional dari pada yang sebelumnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 10.05 WIB di Balai Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Dalam perkembangan lebih jauh, produksi yang telah memiliki langganan tetap warga Tuban, hingga berkapasitas kuintal, namun sayangnya kemasan dipesan tidak boleh tertera label. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Mukhodasa sebagai pelaku usaha pengolahan desa Weru:

“KIMBis bagus cukup membantu usaha, ada pelatihan dan pendampingan, saya aktif. Rata-rata sudah banyak yang ngambil termasuk yang ada di Tuban itu ngambilnya dari sini tapi gak mau pake label, jadi orang-orang itu ngambilnya krupuk ikan ini sampai kuintal an itu gak mau dikasih label itu, ya mau-mau saja toh yang penting ya harganya, yang penting laku”. (Wawancara pada tanggal 24 September 2014, pukul 09.00 WIB di Rumah Ibu Mukhodasah Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Konteks membangun jejaring/kerjasama (*network*) yang dilakukan KIMBis di Kabupaten Lamongan merupakan aspek penting untuk diperhatikan, melalui Surat Keputusan pembentukan KIMBis kedepan diarahkan menjadi bagian dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara, menunjukkan realisasi tindakan yang berbentuk kegiatan kolektif yang diadakan secara inisiatif ataupun mandiri dari tiga pilar aktor, yaitu Peneliti, Penyuluh, dan para Pelaku Usaha agar kehidupan masyarakat menjadi meningkat kualitasnya, hingga penelitian ini dilakukan keadaan yang mendukung kondisi tersebut dilakukan lebih banyak bersifat komunikasi intensif dalam kesempatan-kesempatan pelatihan yang difasilitasi KIMBis. Masyarakat kelompok nelayan pada konteks pelatihan, mereka lebih banyak memiliki inisiatif dengan maksud agar diadakan pelatihan untuk kelompok mereka, KIMBis berperan sebagai fasilitator, trainer, dan pendamping. Sedangkan, wujud kegiatan kerjasama berupa pertukaran sumber daya hasil laut diantara pelaku usaha sejauh ini masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Untuk pelatihan-pelatihan sejauh ini banyak usulan memang datangnya dari kelompok masyarakat, ya KIMBis adakan sama dibantu penyuluh.

Beberapa kesempatan pada komunikasi KIMBis tersebut secara langsung melibatkan peranan pemikiran dari peneliti Balitbang KP khususnya mutu, inovasi, dan standar kualitas masyarakat pengolah, kelompok nelayan tujuan mereka. Namun lebih banyak dari KIMBis sendiri pelatihannya jika belum sifatnya akademis. Pertukaran ekonomis hasil laut belum kelihatan ya pelaku usaha ini dilakukan, mereka menjualkan produk jadi mereka secara mandiri ke luar kawasan, KIMBis sebagai fasilitator kalau ada kegiatan penunjang pasar”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 13.35 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Secara langsung, Balitbang KP menyebarluaskan hasil riset inovasi mereka kepada kelompok masyarakat nelayan di kawasan Weru Komplek, Penyuluh berperan mendampingi kegiatan kelompok ataupun masyarakat, dan pelaku usaha selain menciptakan iklim berusaha juga sebagai pihak yang diberdayakan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Sejauh ini, bentuk keterlibatan diantara ketiga pilar aktor kerjasama tersebut dilakukan atas dasar komitmen dan semangat saling menguntungkan satu sama lain. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Intinya kalo peneliti itu bisa mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok, pemberdayaan masyarakat, bagi pemerintah daerah sinergi dengan program yang dikerjakan, bagi UKM ditolong disisi bisa paket teknologi, bisa pemasaran, bisa bahan baku. Beberapa waktu komunikasi dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, cuman meskipun begitu niat itu sejauh ini kan pusat (BBPSEKP) selaku inisiator, disisi lain masyarakat nelayan (pelaku usaha) juga ada keinginan meningkatkan nilai tambah, dan pihak pemerintah daerah adalah penyuluh sejauh ini ya mendukung kegiatan KIMBis juga karena sejalan dengan kegiatan mereka”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Jejaring kerjasama dari tiga pilar aktor (peneliti, penyuluh, dan pelaku usaha) yang dijelaskan Bapak Toha Muslih di atas juga tidak jauh berbeda dengan

penyampaian dari pengurus yang lain misalnya ruang komunikasi untuk membangun jejaring kerjasama masih diterjemahkan pengurus dalam hal pelatihan dan pendampingan, hal ini disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha:

“Komunikasi pusat dan pengurus sejauh ini mengenai keterlibatan peran masing-masing pelaksana tingkat. Ini diinformasikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, jadi teknis kegiatan yang menjadi wadah komunikasi dalam hal membangun kegiatan kerjasama ya tidak lain adalah pelatihan, stakeholder kami hadirkan meskipun tidak semua datang dalam satu *moment*. Cuma pernah KIMBis ini berkerjasama dalam hal garam, Kabupaten Lamongan juga salah satu dari penerima bantuan PUGAR, itu sebesar 1,417 miliar, disalurkan ke 42 kelompok petambak dan 3 pemasak garam, ini dipakai untuk belanja keperluan produksi. KIMBis diberikan peran untuk mendukung keberhasilannya”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 13.45 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Membangun jejaring dengan SKPD di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu bagian dari KIMBis sebagai pusat kegiatan, keterkaitan ataupun sinergitas antar pelaku program pemberdayaan merupakan upaya efektif dalam mencapai tindakan kolektif. Pemahaman tersebut tampaknya sesuai dengan konteks intervensi kebijakan yang diakselerasi dari BBPSEKP, penyesuaian ini dilakukan KIMBis dengan maksud agar dilakukan penguatan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengaitkan dukungan kepada SKPD terkait di Kabupaten Lamongan. Sejauh ini, program yang telah diselaraskan dengan kegiatan pemberdayaan di KIMBis, meliputi:

1. Program alih teknologi berupa teknologi pengolahan dan aspek pasar untuk meningkatkan nilai tambah,
2. Pelaksanaan prinsip *blue economy* dengan konsep *zero waste*,
3. Program PUMP budidaya selaras dengan programnya penyuluh,

4. Program minapolitan menuju industrialisasi perikanan, dan
5. Program peningkatan kehidupan nelayan serta industrialisasi perikanan yang menjadi wajib untuk diselaraskan.

Sedangkan jaringan kerjasama terjalin dengan Universitas Hangtuh dan Diskoperindag serta PDE (pengolah data elektronik) Kabupaten Lamongan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan:

“Kalau program yang diselaraskan itu alih teknologi, ada teknologi pengolahan dan aspek pasar yang tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah produk, terutama itu selarasnya dengan program di Jakarta itu nilai tambah, kalo di Jakarta disebut dengan konsep industrialisasi perikanan, kalo pak Bupati ngomong nilai tambah, kemudian ada lagi di Jakarta itu *blue economy* itu konsepnya *zero waste* jadi semua aspek ikan itu tidak boleh ada yang terbuang jadi sampah, ini yang sejalan dengan kita, semua produk perikanan itu kalo daging untuk makanan, kemudian sirip tulang termasuk dalamnya *jeroan* untuk makanan ternak, jadi semua itu tanpa terbuang. Program yang lain, PUMP budidaya diselaraskan dengan programnya penyuluh, penyuluh kan punya program jadi kerjasama dengan penyuluh, program minapolitan menuju industrialisasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, terus peningkatan kehidupan nelayan sama industrialisasi perikanan yang sudah diselaraskan yang wajib diselaraskan. Kemudian untuk jaringan kerjasama untuk pengembangan produk itu dengan yang bantu kemarin kita itu Hangtuh itu ada teknologi pengasapan ikan dan variasi produk olahan ikan berupa bakso ikan. Kemudian dengan Diskoperindagkop terjalin berupa penumbuhan jiwa wirausaha, administrasi usaha dan pemasaran. Kemudian dengan PDE (Pengolahan data elektronik) itu terjalin pelatihan pembuatan website”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 09.15 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan, bahwa sejauh ini KIMBis terjalin komunikasi dengan Universitas Trunojoyo bahkan telah menerapkan teknologi untuk daur ulang sampah menjadi biogas, dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...Trunojoyo itu setiap kalo apa gitu kan ada itu menawari, kami dapatkan itu, ya diberikan kimbis juga, alat penerapan teknologi untuk daur ulang sampah dan mesin tepung ikan untuk pakan ternak, sejauh ini masih terjalin komunikasi”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 08:30 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Selain dari sejalannya kegiatan KIMBis dengan program Dinas Kelautan dan Perikanan, inisiatif sinergi juga dilakukan dengan program PUGAR. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Saya melihat dari pelaksanaan memang terjadi sinergi dengan PUGAR, programnya kementerian pusat, KIMBis melakukan bentuk kegiatan dan mendukung ketercapaian dari maksud program misalnya pelatihan dan pendampingan. KIMBis bersinergi dengan usaha garam pak Arifin di Sedayu Lawas dan Pondok Pesantren Sunan Drajad Paciran. Pernah itu dengan Pondok Sunan Drajad KIMBis dalam rangka peningkatan kualitas garam dengan pencucian menjadi garam konsumsi, itu kapasitasnya 1 ton/hari. Sedangkan sinergi dengan kegiatan garam pak Arifin dan program PUGAR ini mengenai penerapan teknologi tepat guna dengan inovatornya bapak Arifin sendiri, kegiatan kerjasama yang dilakukan berupa terpalisasi dan penyaringan air dengan ijuk. Jika benar estimasinya produksi garam itu mencapai 400-600 ton/Ha dari awalnya 80 ton/Ha”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 11.25 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Permasalahan dalam usaha tambak garam adalah sempitnya waktu dalam satu musim yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan garam. Salah satu upaya percepatan untuk menghasilkan air tua, dilakukan dengan menambahkan *doping* garam ke air masih muda. Dengan penambahan *doping* garam ini maka dapat mempercepat penuaan air menjadi BE 25 yang merupakan kondisi ideal untuk proses pengkristalan garam. Penggunaan *doping* garam dapat memangkas siklus penuaan air sampai beberapa hari, sehingga dapat meningkatkan jumlah siklus dalam satu musim. Penggunaan *doping* garam secara total dapat meningkatkan

produksi dan keuntungan yang diterima petambak garam di Kecamatan Brondong.

Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer

Klinik Bidang Pengembangan Usaha:

“Pada tahun 2013 kemarin, petambak garam di Kecamatan Brondong di empat desa sepakat memperluas usaha tambak garam dengan menerapkan teknologi tepat guna pak Arifin. Selama ini garam dihasilkan petambak garam itu berkualitas KW2 dan KW3, menurut pak Arifin sendiri sekarang sudah berkualitas KW2. Penambahan *doping* garam mampu meningkatkan produksi kondisi air menjadi BE 25 dan keuntungan petambak garam”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 14.00 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Transfer teknologi juga dilakukan di kelompok pembudidaya lele di Kecamatan Paciran. Hal tersebut dikarenakan besarnya biaya operasional komponen pakan.

Adanya transfer teknologi ini secara kelayakan teknis teknologi pakan mandiri dapat menghasilkan nilai tambah dan hemat, bahan baku yang digunakan untuk pakan mandiri mudah diperoleh dan harganya murah karena menggunakan limbah ikan yang ada di TPI di Kecamatan Paciran. Tujuan akhir dari transfer teknologi pembuatan pakan lokal adalah adopsi teknologi. Sejauh ini sebagian besar pembudidaya yang mengikuti pelatihan transfer teknologi yang diadakan KIMBis, telah mengaplikasikan hasil transfer teknologi pembuatan pakan mandiri pada usaha budidayanya. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku

Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...temasuk pelatihan pembuatan pakan lokal, itu dihadiri 40 orang bertempat di balai desa Paciran, ada dua narasumber pakar pembuatan pakan ikan alternatif, salah satunya dari KIMBis Gunung Kidul beliau pelopor pakan ikan berbahan lokal disana. 45% peserta hasil pelatihan yang ikut juga mencoba bahan baku lokal itu, sumbernya ada (TPI Paciran) dan harganya murah”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 14.20 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat hal di atas, peluang dalam mengembangkan usaha budidaya dan garam masih besar, untuk itu perlu upaya KIMBis dalam mendukung untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nilai tambah. Komunikasi penyelarasan program pemberdayaan masyarakat sektor perikanan dan kelautan berupa PUMP dan PUGAR serta TTG garam, dalam kapasitas KIMBis sebagai kelembagaan yang mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui perkuatan dan relasi pemangku kepentingan. Program PUMP budidaya, dalam bentuk penguatan usaha kelompok dengan memanfaatkan pelatihan dan pendampingan pembuatan pakan ikan berbahan baku limbah (alternatif) dan pembibitan lele. Program PUGAR, melalui sinergitas penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) garam pak Arifin Jamian yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada garam. Juga terutama kepada masyarakat di kawasan Weru Komplek sebagai lokasi KIMBis beroperasi, dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok pengolah baik binaan KIMBis ataupun diluar selaku pelaku usaha hasil tangkap, dengan maksud agar penerapan IPTEK pengolahan hasil perikanan kaitannya pengetahuan dan produktifitas usaha sesuai dengan prinsip *blue economy*.

Terlebih dari itu, ternyata terdapat ketidaksepahaman diantara kedua lembaga, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan maksud dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi (BBPSEKP) berkegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, tampaknya menjadikan kolektifitas kegiatan kurang optimal, kejelasan tujuan atau tujuan kurang menarik bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan karena penyampaian tujuan pembentukan KIMBis sejak awal adalah *role model*

pemberdayaan dimana masyarakat diharapkan mampu memahami permasalahannya, intensitas berkonsultasi dan berkomunikasi datang ke klinik (KIMBis) sebagai wadahnya, akan tetapi adopsi inovasi yang dimunculkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, maka konsistensi dari BBPSEKP dinilai kurang oleh Kabupaten Lamongan. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri juga kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya KIMBis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...keberhasilannya sana itu (pusat) juga dipengaruhi dari faktor apa kalo ditanya balik dengan adopsi teknologi, apakah ini menjadi tujuan pertama ketika KIMBis ini dilakukan, karena pernah saya tentang sendiri dari 6 profesor peneliti termasuk bu siapa itu, kalo saya katakan sulit karena dia ini kan di sosial ekonomi, pemberdayaan di sosial ekonomi lha ini kok maunya lari ke adopsi, seharusnya ini bukan wilayahnya, kebawahnya itu kan harapannya masyarakat itu memahami akan permasalahan dia, apa yg menjadi masalah dia, kalo dia ndak sakit ya ndak suntik, bahasa kasarnya seperti itu, saya sampaikan seperti itu, mengapa kok satu desa kemudian desa lain, ini juga berpengaruh terhadap peneliti, jangankan kok begitu, 6 profesor peneliti yang hadir itu ndak sepaham kok, sejak awal kan saya sampaikan, KIMBis ini kan menjadi role model pemberdayaan, masih menjadi pertentangan”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 11.00 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Selain dari sinergitas yang sejalan dan mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, sinergitas program yang ada di tingkat SKPD yang dapat dikoordinasikan dengan kegiatan KIMBis adalah program Rumah Kreatif (KIMBis berperan berupa pendampingan pemasaran berupa *online market*), Program Gemerlap (KIMBis berperan berupa pelatihan pengolahan bagi kelompok sasaran dengan sektor perikanan) yang

dikawal oleh Bappeda Kabupaten Lamongan, dan program minapolitan menuju industrialisasi perikanan tangkap dan budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan. Meskipun demikian peran KIMBis belum begitu menonjol dalam mengambil peran berharga diketerlibatannya ini. Namun, dapat dikatakan adanya upaya memperkuat relasi KIMBis telah dirasakan oleh SKPD terutama Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal sebagaimana dimaksud seperti disampaikan oleh Bapak Basuki selaku Ketua Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan:

“Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) telah membantu dan berperan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan. Keberadaan KIMBis ini kami harapkan dapat mengawal dan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah untuk mendukung industrialisasi perikanan. Program pemberdayaan di Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat diselaraskan bisa berupa program minapolitan menuju industrialisasi perikanan tangkap dan budidaya, selain pelatihan KIMBis kami harapkan dapat berperan memberikan kesempatan magang bagi tenaga dan pihak yang berkepentingan”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 13.30 WIB di Kantor Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Menurut profil KIMBis Kabupaten Lamongan 2014 disebutkan bahwa program dan kegiatan yang berkelanjutan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan diantaranya, meliputi (1) Program Minapolitan Menuju Industrialisasi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap; (2) Program PUMP P2HP, PUMP Budidaya dan PUMP Tangkap dan PUGaR; (3) Pengelolaan dan pemanfaatan PPDI; (4) Rencana operasional PPI Sedayulawas; (5) Sertifikasi rumah nelayan; (6) Revisi Perda Ijin Usaha Perikanan; (7) Tugas Pembantuan: PUGaR, P2HP (R3 dan *Coldstorage*) dan Budidaya; (8) Pembinaan Program KIMBis; (9) AMDAL industri perikanan; (10) Air bersih untuk nelayan; (11)

Pabrik Es Tirta Maharani; (12) Pendapatan Asli Daerah (PAD): TPI, Perijinan; dan (13) Usulan Penghargaan Mina Bahari Hari Nusantara Tahun 2013 (Profil KIMBis Lamongan, 2014). Melalui hal itu, ternyata pada poin 8 dapat dilihat bahwa salah satu dari program yang berkelanjutan adalah pembinaan program KIMBis, hal tersebut memberikan isyarat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tampaknya telah memberikan dukungan dan berkomitmen terhadap keberlanjutan kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan.

b. Kegiatan Advokasi/ pendampingan pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Sejak dibentuk dan dioperasikannya KIMBis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kabupaten Lamongan, maka secara tidak langsung KIMBis berfungsi memfasilitasi kepentingan atau kebutuhan antara sumber teknologi dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Sedangkan fungsi ekonomi KIMBis adalah wadah untuk membina dan mendampingi pengembangan *entrepreneurship* masyarakat berdasarkan potensi sumberdaya yang terdapat pada lingkungannya, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir. Advokasi atau pendampingan merupakan aspek melekat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena berkaitan dengan berbagai alternatif penyampaian aspirasi secara hukum dan kebijakan. Namun, kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan berdasarkan pembentukannya sejauh ini belum merambah pendekatan advokasi bersifat hukum dan kebijakan kepada pemerintah, akan tetapi dilakukan proses pendampingan bersifat umum. Hal ini

seperti disampaikan Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Melihat advokasi atau pendampingan berarti berkaitan dengan hukum dan kebijakan, KIMBis belum ke arah sana. Akan tetapi dalam pendampingan yang biasa dilakukan KIMBis ini secara umum, misalnya mengajukan permohonan kebutuhan teknologi dan pendampingan penguatan kapasitas pelaku usaha”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.35 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Hal di atas, juga dikuatkan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...jadi kami itu tidak sekedar memberikan pelatihan gitu saja tapi kami juga memberikan pendampingan mulai belum bisa sampai menjadi bisa dan sampai bisa berkembang, pengurus tinjau kesana jadi tidak putus gitu saja, berkelanjutan mulai dari pengemasannya, mulai dari pembuatannya mulai dari belum bisa menjadi bagus. Kadang kalo pelatihan itu karena ikannya mahal disana, mintanya disini, alat kami bawakan dari sini”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.25 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa advokasi/pendampingan yang dilakukan KIMBis Kabupaten Lamongan sejauh ini bersifat rutinitas kaitannya mendampingi kelompok sasaran dan pelaku usaha. Hal ini juga dikuatkan adanya penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan KIMBis, pendampingan dimaksudkan sebagai tindak lanjut pelatihan dari setiap kegiatan KIMBis, dilakukan oleh tim pelaksana KIMBis di lokasi yang terdiri dari Manajer KIMBis dan Asisten Manajer. Dalam pelaksanaan pendampingan, pelaksana KIMBis di lokasi dapat bermitra dengan penyuluh termasuk penyuluh mandiri, petugas teknis perikanan, perguruan tinggi, serta LSM yang terdapat di lokasi (Petunjuk Teknis KIMBis, 2011:15).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara, kegiatan pendampingan KIMBis Kabupaten Lamongan dilakukan terhadap kelompok masyarakat nelayan dan pelaku usaha. Daftar kelompok dampingan KIMBis Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Kelompok Budidaya Pembinaan KIMBis Desa Weru

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Jenis	Ketua
1	Sidomakmur	Sidokelar	Budidaya lele	Burhan
2	Karya Mandiri	Weru	Budidaya lele	Tauhid
3	Pantura Lestari	Paciran	Budidaya lele	Muhafiyin
4	74,2	Telogo Sandang	Budidaya udang <i>vanamee</i>	M Husni

Sumber: Data primer penulis

Tabel 21. Kelompok Pengolah Pembinaan KIMBis Desa Weru

No.	Nama usaha	Pemilik	Lokasi	Produk usaha
1	Vila putra	Khotamah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
2	Lancar	Bunayatul adibah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Reginang
3	Debi jaya	Fatihatul fa'ziah	Weru	Krupuk cumi-cumi
4	Zahra	Hamidah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
5	Larifsa jaya	Umu khofifah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
6	Ibu mukhodasah	Mukhodasah	Weru	Krupuk cumi-cumi
7	Fairuz jaya	Muflihah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Petis ikan Petis udang
8	Novi	Nasyah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
9	Sari rasa	Hindun janariyah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
10	KIMBis Weru	Hamidah	Weru	Chrispy ikan Ikan kering Terasi udang
11	Putri laut	Husnul khotimah	Warulor	Petis udang

				Terasi udang Krupuk ikan
12	Pak jack	Mushlih	Sidokumpul	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Krupuk udang
13	Sumber barokah	Anif mabruroh	Paloh	Makanan ringan
14	Alfi	Saemah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
15	Berlian laut	Shofia aqila	Kranji	Abon ikan Stik ikan Krupuk ikan
16	Duta nelayan	Muh. Dzulfiqor	Drajat	Bakso ikan Nugget ikan Otak-otak

Sumber: Data primer penulis

Tabel 22. Kelompok Garam Pembinaan KIMBis Desa Weru

No.	Kelompok garam	Lokasi	Ketua
1	Sarem Makmur	Tunggul	Ibu Supiyati
2	TTG Arifin	Sedayu Lawas	Arifin Jamian

Sumber: Data primer penulis

Keberadaan daftar kelompok nelayan dan pelaku usaha di atas, dalam hal ini terlibat dan menjadi binaan KIMBis Kabupaten Lamongan merupakan kelompok nelayan dan pelaku usaha terbentuk sebelum keberadaan KIMBis dan yang terbentuk dalam proses kegiatan pelatihan KIMBis berlangsung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik

Bidang Pengembangan Usaha:

“Kelompok dan pelaku usaha perorangan memang ada yang sudah terbentuk sebelum adanya KIMBis dan ada kelompok/pelaku usaha itu memang bukan sengaja dibentuk tapi pada saat pelatihan diundang, akhirnya ada inisiatif berkelompok dan berusaha. Maka dari itu kami maksimalkan saja kelompok yang sudah ada itu supaya tidak tumpang tindih antara orang satu dengan lainnya pada kelompok lain. Sebab inilah pendekatan KIMBis bukan pada kelompok, terdapat pada sasaran kegiatannya”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 09.38 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan pengurus. Sejauh ini, KIMBis melakukan 6 bentuk kegiatan pendampingan. Keenam kegiatan pendampingan ini, merupakan hasil proses dialog dengan pengurus KIMBis Desa Weru. Hal ini dikarenakan program kerja yang menjabarkan proses pendampingan memang tidak disusun sebelumnya. Enam bentuk kegiatan pendampingan adalah meliputi:

- a) Pendampingan penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan
- b) Pendampingan dan pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha
- c) Pendampingan peningkatan kualitas usaha pengolahan garam tradisional
- d) Pendampingan dalam rangka transfer teknologi pembuatan pakan buatan dan pemijahan lele
- e) Pendampingan dan fasilitasi permohonan kebutuhan teknologi
- f) Pendampingan dalam rangka pembukaan akses terhadap peluang pasar berupa pameran dan pemasaran keliling

Perlu diperhatikan, tujuan KIMBis tidak bisa dilepaskan dari adanya peran serta kelompok sasaran dan pelaksana tingkat lokasi (pengurus) untuk menjalankan proses pendampingan. Pertama, mendorong tumbuhnya *entrepreneurship* pada kelompok sasaran dengan memanfaatkan IPTEK, sehingga terjadi perubahan orientasi usaha dari sub-sisten ke pasar. Kedua, mempercepat proses penerapan teknologi dan memperoleh umpan balik dari kelompok sasaran untuk memperbaiki teknologi yang diintroduksi. Melalui hal itu, maka tujuan KIMBis akan dapat dicapai jika adanya partisipasi yang memadai dan dilakukan proses pemberdayaan masyarakat. Agar masyarakat menjadi berdaya yang

berwirausaha adalah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan ataupun kapasitas, menerapkan inovasi-inovasi dan ide yang dapat diterima oleh masyarakat kelompok nelayan dan pelaku usaha di lokasi kegiatan KIMBis.

1) Motivasi

Usaha pengolahan garam rakyat secara tradisional banyak dilakukan secara turun temurun, salah satunya adalah di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran yang menjadi kelompok binaan KIMBis. Potensi ekonomi garam rakyat sebagai salah satu alternatif mata pencaharian penduduk lokal menjadi perhatian penting karena merupakan salah satu sumber pendapatan keluarga. Sejauh dari hasil wawancara dengan pengurus KIMBis, bahwa selama ini potensi garam di Desa Tunggul sebagai kelompok binaan KIMBis belum banyak mendapat perhatian baik perorangan ataupun kelembagaan, padahal produk garam secara tradisional di kawasan Desa Tunggul diketahui masyarakat mempunyai kelebihan yaitu produk garam putih dan bersih. Produksi garam dijual dipasar lokal tanpa dikemas dan daya saing. Kesulitan yang dihadapi adalah adanya persaingan dengan garam pabrik yang menguasai pasaran. Dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan garam rakyat kelompok Sarem Makmur di Desa Tunggul, KIMBis melakukan pendampingan dan pelatihan penguatan kapasitas usaha bagi para pelaku usaha pengolahan garam tradisional berstandar garam konsumsi. Pelaksanaan pendampingan dilakukan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Laut Pesisir dan Badan Litbang KP.

Fokus kegiatan KIMBis dalam pendampingan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha pengolahan garam tradisional di kawasan Desa

Tunggul, akan tetapi sebagai pemicu baru dilakukan kepada satu kelompok yaitu kelompok Sarem Makmur. Dalam perkembangannya garam tradisional kelompok Sarem Makmur telah bermetamorfosis menjadi produk garam kemasan dengan terdapat PIRT. Produksinya juga dilakukan secara lebih memadai dengan dukungan dari pengurus KIMBis berupa inovasi peralatan yaitu *stanless*. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara ini:

“Garam desa Tunggul terutama kelompok Sarem Makmur produksinya dulu dijemur, dimasak oleh masyarakat memakai tong dan di bungkus kantong kresek namun saat ini sudah pakai *stanless* jadi lebih cepat produksinya dan higienis selain itu dibungkus plastik jadi lebih praktis dan ada kemasan PIRT nya”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10.30 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Produk Garam Rakyat Binaan KIMBis
Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis desa Weru

Selain dari peningkatan kualitas usaha garam, bentuk motivasi yang lainnya adalah kegiatan transfer teknologi pembuatan pakan berbahan baku lokal dan pemijahan lele di Kecamatan Paciran. Hal tersebut terkait dengan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan terutama komponen pakan. Usaha budidaya ikan lele memiliki prospek yang menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten

Lamongan dengan media terpal. Sejauh dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara, usaha budidaya lele memang tergolong butuh biaya untuk pakan lele cukup besar, sehingga ini berakibat terhadap biaya yang dikeluarkan terutama bagi pembudidaya yang kurang berdaya. KIMBis berupaya dalam membantu kelompok pembudidaya lele dengan transfer teknologi inovasi. Hal ini seperti disampaikan dari Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Lele itu tergolong ikan makannya banyak sehingga butuh biaya besar, pembudidaya merasa keberatan karena itu maka kita latih dan dampingi agar kelompok-kelompok lele itu bisa tetap bertahan dengan membuat pakan sendiri dari bahan baku di sekitar, bisa berupa limbah karena di sini sangat banyak. Formula dan teknis caranya KIMBis yang bantu, itu kan sudah suatu teknologi”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10.15 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Sejauh ini dari hasil penjelasan pengurus, kecamatan Paciran memang terdapat sumber bahan baku seperti dedak, tepung, bungkil kedelai, minyak ikan dan limbah pengolahan hasil perikanan tangkap yang sangat melimpah. Dari segi ekonomis teknologi pakan mandiri dapat meningkatkan produktifitas budidaya, sedangkan disisi lain dapat memberikan nilai tambah pada usahanya. Oleh karena itu KIMBis bersama beberapa kelompok pembudidaya lele melakukan kegiatan pembuatan pakan ikan alternatif untuk kebutuhan pakan budidaya ikan mereka.

2) Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Sejauh hasil pengamatan di lapangan, kawasan Weru Komplek merupakan salah satu sentra industri pengolahan produk perikanan skala rumah tangga, berbagai macam produk dihasilkan oleh masyarakat setempat. Namun, produk-produk olahan masih sangat tradisional dilakukan seadanya, proses produksi juga

masih bersifat sederhana dan belum higienis. Pada aspek pemasaran, pasar masih terbatas di lokal dan tanpa *branding*, sehingga persaingannya kurang. Melalui kegiatan KIMBis, masyarakat di lokasi terutama ibu-ibu pengolah hasil perikanan skala kecil yang berasal dari desa kelompok sasaran KIMBis yaitu Desa Weru, Paloh, Waru Lor, dan Sidokumpul dilakukan pendampingan dalam proses pembuatan aneka produk hasil perikanan yang inovatif dan berdaya saing pasar. Langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan para pengolah di lokasi KIMBis di Weru Komplek. Pendampingan kaitannya penguatan kapasitas pengolahan produk dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan waktu, kesepakatan antara pengurus, dan pelaku usaha di lokasi tempat studi. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Proses pendampingan masyarakat pengolah hasil laut Desa Weru ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Menyesuaikan waktu karena kesibukan pengurus dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha skala kecil, biasanya mereka yang menawarkan waktu pada KIMBis”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10.15 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat hal di atas, bahwa pendampingan kepada masyarakat pengolah hasil perikanan adalah kelanjutan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pendampingan yang dilakukan KIMBis, sejauh ini belum melibatkan peranan stakeholders diluar pengurus, artinya dilakukan secara mandiri oleh pengurus KIMBis. Hal sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Pendampingan KIMBis di masyarakat Pengolah (tampak baju kuning Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer*)

Sumber: Dokumentasi penulis

Teknologi baik inovasi ataupun fisik yang dimanfaatkan kelompok pengolah, diantaranya dipergunakan sebagai penunjang proses produksi secara berkelompok. Sejauh ini, intervensi teknologi yang berwujud fisik memang telah diterapkan kepada KIMBis yang bisa dipakai untuk bersama, yang didapatkan dari sumber Dinas Kelautan dan Perikanan. Wujud teknologi berupa fisik dan inovasi dipergunakan dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas hasil olahan perikanan laut. Lebih banyak teknologi fisik ini dimanfaatkan oleh kelompok pengolahan secara bersama. Teknologi berwujud fisik tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 14. Peralatan penunjang produksi dan pengolahan ikan

Sumber: Dokumentasi penulis

Selain dari pendampingan penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan, pendampingan dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan adalah pengurusan sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha. Sejauh dari temuan di lapangan, KIMBis telah melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan *image product* dan daya saing melalui pengemasan dan usaha peningkatan jaringan pemasaran. Hal yang dilakukan adalah memfasilitasi pengurusan sertifikasi PIRT (Ijin Pangan Industri Rumah Tangga). Terbitnya PIRT merupakan salah satu bentuk pengakuan dari Dinas Kesehatan selaku Instansi yang berwenang memberikan dan menerbitkan ijin pangan, dimana dengan PIRT keamanan pangan industri rumah tangga terjamin kualitasnya sehingga konsumen percaya dan tertarik. Sejauh ini, sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga sudah dilakukan pembinaan KIMBis terkait sanitasi dan higienitas produk olahan dengan maksud agar pelaku usaha dapat memenuhi standar usahanya. Setelah dilakukan pembinaan, survey dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan hasilnya sebanyak 16 usaha binaan KIMBis dinyatakan layak mendapatkan sertifikasi PIRT yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Hal ini seperti disampaikan Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan: “Secara fisik pelaku usaha binaan KIMBis telah mendapatkan ijin PIRT, sebanyak 16 pelaku usaha, jadi ada *standart* terus cara pengolahan dengan baik, pengemasan produk, dan perluasan akses pasar”. (Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 09.27 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Menurut penjelasan dari pengurus KIMBis Desa Weru, bahwa fasilitasi pengurusan PIRT kepada 16 pelaku usaha kelompok sasaran tersebut terjadi pada tahun 2012. Dengan demikian hingga 2014 pendampingan sertifikasi PIRT hingga mendapatkan ijin hanya dilakukan selama 1 (satu) kali oleh pengurus KIMBis Desa Weru, selain masalah kelayakan usaha adalah anggaran untuk mendapatkan ijin pangan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Hal yang dilakukan untuk dapat PIRT itu adalah mengisi identitas, gambaran produk dan tempat usaha, layak atau tidak. Itu karena kami melihat anggaran, difasilitasi KIMBis jadi anggaran cukup 16 usaha saja pada tahun 2012 itu, ke 16 usaha lolos semua. Jadi biaya sampai keluar PIRT di Dinkes itu tidak murah, 250 ribu per usaha, pada waktu itu mereka keberatan jadi kita fasilitasi ke Balai Besar Penelitian anggaran tersebut. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 10.15 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Selain masalah anggaran dan kelayakan usaha, masalah yang menyebabkan sertifikasi jalan ditempat adalah karena masyarakat kurang memahami efek PIRT kedepan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Ada kok yang ada disini yang dibuatkan PIRT nggak mau, wong saya jual gini saja sudah laris kok, gitu, dia nggak memandang kedepannya nanti. PIRT sekarang berjalan di tempat, karena mahalnya biaya untuk mendapatkan dan karena masyarakat sendiri juga gak mau diajak, karena dua hari harus ikut pelatihan”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.55 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Keberadaan dan terbitnya PIRT bagi pelaku usaha skala kecil dari pendampingan KIMBis Desa Weru diharapkan memberikan daya saing produk dan dapat menembus pasar yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 15. Produk Hasil Pemberdayaan dengan PIRT dari Dinkes Kabupaten Lamongan

Sumber: Dokumentasi penulis

Adapun daftar 16 nama peserta yang difasilitasi KIMBis Desa Weru sehingga mendapatkan sertifikasi PIRT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. Daftar Pelaku Usaha Peningkatan Kapasitas Penerima Sertifikasi PIRT

No.	Nama usaha	Pemilik	Lokasi	Produk usaha
1	Vila putra	Khotamah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
2	Lancar	Bunayatul adibah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Reginang
3	Debi jaya	Fatihatul fa'ziyah	Weru	Krupuk cumi-cumi
4	Zahra	Hamidah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
5	Larifsa jaya	Umu khofifah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
6	Ibu mukhodasah	Mukhodasah	Weru	Krupuk cumi-cumi
7	Fairuz jaya	Muflihah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Petis ikan Petis udang
8	Novi	Nasyah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan

9	Sari rasa	Hindun janariyah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
10	KIMBis Weru	Hamidah	Weru	Chrispy ikan Ikan kering Terasi udang
11	Putri laut	Husnul khotimah	Warulor	Petis udang Terasi udang Krupuk ikan
12	Pak jack	Mushlih	Sidokumpul	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan Krupuk udang
13	Sumber barokah	Anif mabruroh	Paloh	Makanan ringan
14	Alfi	Saemah	Weru	Krupuk cumi-cumi Krupuk ikan
15	Berlian laut	Shofia aqila	Kranji	Abon ikan Stik ikan Krupuk ikan
16	Duta nelayan	Muh. Dzulfiqor	Drajat	Bakso ikan Nugget ikan Otak-otak

Sumber: Data primer penulis

3) Manajemen Diri

Perspektif transfer teknologi berupa ide dan wujud fisik peralatan adalah salah satu kebutuhan penting dalam industrialisasi perikanan. Keberadaan KIMBis Desa Weru tidak luput dari adanya aktivitas yang berkaitan dengan fasilitasi dalam mewujudkan umpan balik transfer teknologi antara pengguna dan inisiator berdasarkan pembentukannya. Dalam kaitannya dengan pendampingan KIMBis Desa Weru berperan selain sebagai fasilitator transfer teknologi yang diintroduksi juga melakukan pendampingan secara teknis misalnya pembuatan proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Sekian pelatihan digelar kemudian ada usulan maka ditampung aspirasi dari kelompok itu misalnya kebutuhan peralatan, teknologi apa yg mereka butuhkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas, KIMBis komunikasikan dengan pihak pusat. Jika ada informasi bantuan, pembuatan proposal juga kami dampingi, yang pernah itu ke Provinsi dan Kabupaten”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.25 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

4) Mobilisasi Sumberdaya

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber belum dilakukan pada proses kegiatan pendampingan KIMBis Kabupaten Lamongan, tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial sejauh ini belum tersentuh oleh adanya kegiatan ini, sebab warga desa Weru cenderung berkeinginan menjalankan usahanya sendiri-sendiri menjadi *home industry*. Hal ini seperti disampaikan dari Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...orang sini itu sudah dibentuk kelompok itu terus repot, sudah dibentuk kelompok itu terus sendiri-sendiri, karena masing-masing produksinya lebih suka sendiri-sendiri lebih enak gitu katanya, jadi *home industry*, selain kami latih disana (wilayah lain) kan bentuknya kelompok setelah kami lakukan pelatihan lalu disitu dibentuk satu kelompok, jadi kelompok itu mengajukan minta difasilitasi apa kami yang mengajukan proposal dibawa pak Toha ke Dinas, atau penyuluh, kalo di Weru ini kami mau jadikan sebuah jenis kas kelompok ya sulit”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

5) Pembangunan dan Pengembangan Jejaring

Selain dari adanya bentuk sinergitas yang dimaksudkan agar timbul dukungan program dengan keberadaan KIMBis di lokasi adalah membangun relasi pasar ataupun kerjasama usaha dengan maksud agar memperkuat

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lokasi studi. Sejauh ini, komunikasi telah dibangun sebagai bagian dari upaya mencari sumber-sumber dan peluang bagi masyarakat sasaran dari luar berupa pasar dan jaringan kerjasama misalnya Perguruan Tinggi dan LSM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dengan dikuatkan juga adanya dokumentasi dan rincian kegiatan, KIMBis melakukan penjajagan terhadap pangsa pasar diantaranya adalah PT. Tridian (Puskoppas Jawa Timur), Masjid Agung Surabaya, Puspa Agro Sidoarjo, dan *outlet* hasil olahan perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“...itu saya sampai pernah itu datang ke kakaknya pak dhe Karwo yang ada di Jawa Timur, namanya pak Joko, saya dengan mobil dinas bersama pak Pur datang kesana, diberikan satu fasilitas di Puspa Agro 2 tempat (bidak) disana untuk penjualan ini, kulkasnya pun saya bawa kesana, karena disana itu satu karena masih sepi pada saat itu, keduanya saya tahu kerupuk yang disana itu ternyata harganya lebih murah dari sini, makanya saya tutup kembali, persaingannya kan persaingan harga, KIMBis ini pembuatannya masih dengan cara manual, dari sana kan sudah dari pabrik. Kami diberikan satu kesempatan bagi KIMBis diajak pameran dalam satu bulan sekali di Masjid Agung, berangkat subuh, sama pak Pur kalo dari dinas, kadang saya kalo gak gantian sama pengolah lain, jadwalnya itu satu minggu sekali di Surabaya, terus dari perikanan sendiri itu kan ada *showroom*, itu sudah buka dan produk kami ini ada disitu, tapi sekarang sudah tutup karena nggak ada yang jaga, ibu-ibu juga diundang kesana untuk mengisi *showroom* itu”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.35 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Selain itu, pameran juga dilakukan dengan maksud selain kaitannya dengan pemasaran adalah pengenalan produk hasil kegiatan KIMBis, dilakukan dalam *event-event* tertentu, Hari Nusantara tingkat Provinsi, kegiatan perikanan, pameran dalam rangka Gempita Regional II, pameran di Jakarta diantaranya pameran di

kantor BBPSEKP dan pameran KIMBis *Expo* serta pameran KIMBis bersama pelaku usaha. Dinas Kelautan dan Perikanan biasa menginformasikan ketika ada acara di Kabupaten Lamongan misalnya HJL (Hari Jadi Lamongan) hingga beberapa hari lalu KIMBis dapat untung besar sebesar 3 juta dari penjualan di acara reuni ibu-ibu bank Jatim di Kabupaten Lamongan, secara keseluruhan inisiatif dari seorang asisten manajer klinik bidang promosi dan pemasaran adalah membantu ibu-ibu pengolah untuk dapat dikenal dimasyarakat luas, hingga 6-7 hari harus jualkan produk pulang pergi. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Mereka itu mau membuat asalkan ada yang memasarkan, tapi alhamdulillah, itu yang baru pemula, sehingga kami harus memasarkan, tapi saat ini disini rata-rata sudah banyak yang ngambil, ya memang inisiatif kami tujuannya untuk membantu ibu-ibu pengolah agar lebih dikenalkan kepada yang lain, disitu ada tulisanya produksi pelaku usaha (si a) mitra KIMBis, kami jadikan mereka-mereka itu mitra kami yang termasuk binaan dari kami”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.40 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Promosi dan pameran dilakukan dengan maksud agar produk hasil kegiatan pendampingan KIMBis menjadi dikenal masyarakat luas. Hal ini dapat dipahami, pendampingan yang dilakukan pada konteks pemasaran ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari serangkaian proses pelatihan hingga produksi dilakukan. Hal sebagaimana dimaksud, pada salah satu kegiatan pameran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 16. Pameran Produk Hasil Perikanan yang di ikuti KIMBis
 Sumber: Dokumentasi pengurus KIMBis desa Weru

Selain dari hanya dilakukan penjajagan pasar dan pameran, KIMBis juga dikuatkan dengan komunikasi dunia akademis misalnya Universitas dan sekolah. Sebagai bagian dari upaya menjalin kerjasama dengan masyarakat terutama tenaga ahli dari Universitas. KIMBis telah berkomunikasi kepada Perguruan Tinggi meskipun masih dalam rangka diskusi-diskusi kecil dan koordinasi serta inisiatif dari pihak Universitas, namun beberapa diantaranya juga sudah melakukan wujud kegiatan, adapun Perguruan Tinggi dan sekolah yang pernah berkomunikasi dengan KIMBis diantaranya adalah Hangtuh Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Unair Surabaya, dan SMK Sidayu Kabupaten Gresik. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ke Perguruan Tinggi belum pernah dilakukan hingga kerjasama, cuma kami pernah komunikasi saja. Juga dengan pihak SMK Sidayu dan LSM kami saling tukar informasi. Perguruan Tinggi sudah meskipun masih belum bentuk kerjasama dikuatkan MoU dan menyentuh kelompok

sasaran kegiatan. Memang Universitas Trunojoyo ada program IBM (Iptek Bagi Masyarakat) mencari sasaran kegiatan awalnya ada interaksi kami jelaskan kegiatan KIMBis dan ketemunya disini tentang biogas limbah ikan. Sedangkan Hangtuh terkait pengasapan, karena satu pengurus ada yang kenal dari dosen nya. Unair dalam bentuk penjajagan program kerja dilakukan di sekretariat”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 08.50 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

c. Kegiatan Konsultasi pada KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Keberadaan KIMBis di Desa Weru Kabupaten Lamongan selain dari tidak dapat dilepaskan dari adanya pola komunikasi antara Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) sebagai penggagas dengan pengguna manfaat teknologi inovasi dalam hal ini adalah masyarakat sasaran (kelompok nelayan dan pelaku usaha) dimana KIMBis adalah wadahnya, juga berkaitan dengan aspek dan mekanisme konsultasi dalam menjalankan kelembagaan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Merujuk kepada definisi berdasarkan Surat Keputusan pembentukan, dijelaskan bahwa Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait. Melihat hal tersebut, dapat dimaknai bahwa konsultasi merupakan dan dilakukan sebagai bagian penting dalam menjalankan KIMBis di lokasi sasaran, dengan memperhatikan sejauh mana keterlibatan, mekanisme, kapasitas, dan peran stakeholders dalam kapasitasnya sebagai *partner* dalam berkonsultasi dengan masyarakat nelayan, maka didapatkan pemahaman atas pengaruh serta kualitas konsultasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil

pengamatan di lapangan dan wawancara dengan Bapak Arif Soedjanarta sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa sejauh ini aktivitas konsultasi yang terjadi di KIMBis Desa Weru dilakukan dengan teknik wawancara/dialog antara pengurus KIMBis kepada masyarakat sasaran. Dialog terjadi dengan melihat gambaran permasalahan seputar produk usaha dari pelaku usaha, kelompok sasaran, dan pengolah hasil perikanan laut yang waktu bersamaan memiliki *problem* usahanya, permasalahan disampaikan pada saat pelatihan berlangsung. Hal ini sebagaimana pernyataannya dalam kutipan dibawah ini:

“Paling tidak kegiatannya teman-teman KIMBis ini mendekatkan diri pada sentra-sentra usaha perikanan kelautan. Ini termasuk mengapa demikian dilaksanakan karena orang-orang skala UKM (Usaha Kecil Menengah) itu dia tidak mengerti apa kebutuhannya dan permasalahannya kalau tidak dilaksanakan dengan teknik pembinaan. “*Oh iya ternyata kalau saya itu punya kelemahan ini*”, jadi mereka baru terasa ketika produk itu tidak laku di pasaran atau tidak habis dijual, itu baru tahu kenapa tidak diterima pasar. Baru diajak wawancara KIMBis dibantu dengan penyuluh baru tahu kalo kurangnya ini bagi mereka. Sehingga teknik konsultasinya itu seperti itu, jadi kalau mereka datang ke klinik seperti orang sakit pergi ke dokter tidak seperti itu, dia sendiri tidak tahu kalau sedang sakit”. (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 09.17 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Melihat adanya kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas konsultasi dilakukan oleh pengurus KIMBis dengan dibantu penyuluh saat sedang berlangsung kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan menghadirkan ahli atau narasumber yang sesuai dengan tema. Berdasarkan makna umum konsultasi dilakukan secara tatap muka dengan mekanisme dialog dengan maksud memperoleh hasil, solusi, dan pemecahan masalah. Selain dari konsultasi yang dilakukan di kegiatan pelatihan, aktivitas konsultasi juga dilakukan secara

tidak formal. Hal ini seperti disampaikan dari Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...datang ke klinik, tidak formal, kadang kalanya dijalan ketemuanya saya dilaut, dijalan ya saya layani, karena kantor kami kan tidak selalu buka, orang-orang sini sendiri kan sibuk dengan kegiatannya, kalo saya gak bisa jawab ya saya tanya pak toha, kalo sifatnya akademis saya mintakan bantuan ke dinas atau ke balai besar. Kelompok-kelompok yang kami fasilitasi PIRT kemarin itu konsultasi pada kami, konsultasinya itu mulai dari cara pengemasan, untuk lebih baik produksinya bagaimana, sama pemasarannya, dia nya itu mau membuat asalkan ada yang memasarkan”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.15 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

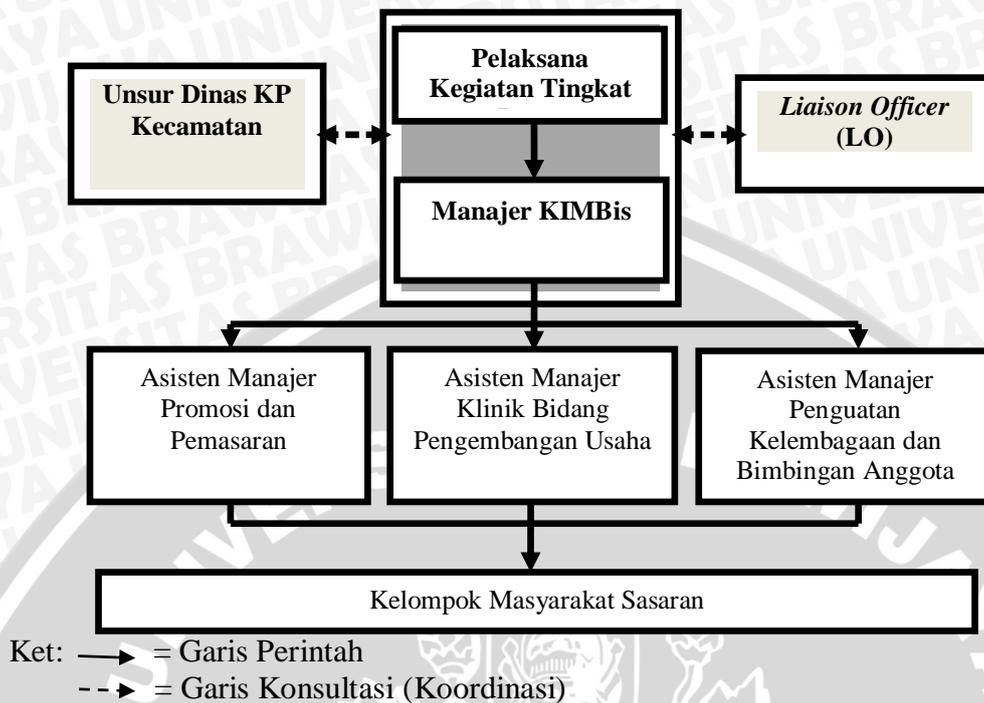
Terkait hal tersebut KIMBis sebagai kelembagaan sekaligus wadah pemberdayaan maka sudah sewajarnya melaksanakan fungsinya dalam upaya mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dalam konteks produk usaha perikanan baik yang dilakukan pada *moment* pelatihan maupun di dalam sekretariat secara perorangan bagi masyarakat pesisir umum. Menunjuk hal tersebut disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan bahwa untuk melaksanakan konsultasi secara perorangan maka diperlukan komitmen pengurus KIMBis. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Konsultasi tidak memungkinkan dilakukan perorangan, satu orang secara gantian. Itu yang menyebabkan perlu adanya komitmen antara pengurus KIMBis, Penyuluh dan pelaku usaha sebagai subjek. Sehingga dalam memecahkan masalah perlu diadakan skala prioritas. Skala prioritas ini dalam artian dipecahkan permasalahan bersifat umum hampir semua pelaku usaha mengalami, contohnya pemasaran, mutu, permodalan. Jadi tidak dilihat satu persatu untuk diselesaikan dan diakomodir kebutuhannya”. (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 09.20

WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Seperti disampaikan Bapak Arif Soedjanarta di atas, juga dinyatakan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan, dalam kutipan berikut ini: “Jika sifatnya sederhana dan mampu cukup pengurus, karena kepengurusan ini tidak dipilih dalam rangka punya keahlian tapi dipilih sebab domisili dan punya kemauan saja”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 09.25 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Sesuai dengan kutipan di atas, menunjukkan bahwa penekanan pelaksanaan konsultasi tidak dapat dibebankan begitu saja kepada peran utama seorang pengurus lokasi sebagai tenaga yang menjalankan kelembagaan, melainkan juga kepada *stakeholders* yang berkapasitas memberikan informasi. Pada bagian lain, konsultasi yang dibangun dalam menjalankan KIMBis Desa Weru antara pengurus, *stakeholders*, dan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan (BBPSEKP) menjadi hal yang penting sebagai satu kesatuan mekanisme. Berdasarkan struktur pelaksana KIMBis tingkat lokasi, maka manajer KIMBis dan pelaksana kegiatan tingkat pusat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tenaga penghubung yaitu *Liaison Officer* (LO) dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan. Hal garis konsultatif dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 17. Struktur Pelaksana KIMBis Tingkat Lokasi

Sumber: Petunjuk teknis KIMBis (2011:23)

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan dikuatkan adanya mekanisme garis konsultatif di atas, konsultasi dan koordinasi antara pelaksana pusat dan pelaksana lokasi KIMBis dilakukan dengan tenaga penghubung atau *liaison officer* (LO) dan unsur Dinas KP Kecamatan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ditetapkannya, *liaison officer* (LO) adalah tenaga setempat yang memahami karakteristik lokasi kegiatan dan memiliki kepakaran dalam pemberdayaan masyarakat di lokasi, dalam hal ini adalah Desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Fungsi lain LO adalah sebagai PR (*public relation*) dari KIMBis. Sehingga konsultasi dalam tataran pelaksana pusat dan lokasi KIMBis dilakukan dengan mencermati keberpahaman *liaison officer* di lapangan. Melihat hal tersebut semestinya penghubung dan *public relation* dalam memberikan informasi adalah *Liaison Officer* (LO), sehubungan dengan hal ini

manajer KIMBis Desa Weru sejak awal telah menjabat sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Paciran dan merangkap sebagai penyuluh untuk wilayah Paciran dan Brondong, sehingga peran *liaison officer* menjadi tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Semestinya *Liaison Officer* (LO) nya yang bertugas membagi dan penghubung berbagai informasi, karena manajer ini juga penyuluh Kecamatan Paciran dan Brondong jadi lebih enak hubungannya kalau ada perlu dikomunikasikan. Manajernya ini juga merangkap sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.24 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Dengan demikian alur konsultasi struktural yang ditetapkan berdasarkan pembentukannya, pada KIMBis Desa Weru dilakukan secara fleksibel. Sedangkan berdasarkan ditetapkannya dalam struktur KIMBis lokasi, unsur Dinas KP Kecamatan merupakan petugas perikanan yang memahami karakteristik lokasi kegiatan dan mempunyai keterikatan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, dengan demikian dapat menjadi penghubung antara KIMBis Desa Weru dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan SKPD lainnya.

d. Ketercapaian Hasil Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Kegiatan KIMBis (dilihat pada Kemampuan Ekonomi dan Eksternalitas Sosial)

KIMBis Kabupaten Lamongan yang berada di kawasan Weru kompleks (terdiri dari empat desa) sejak tahun 2011, meskipun belum menunjukkan signifikasinya terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ternyata telah terlihat nilai kegiatannya, antara lain memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat pelaku usaha, penguatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kemampuan usaha pengolahan produk, peningkatan nilai tambah pengolahan garam tradisional, dan kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan di lokasi kegiatan. Hasil pendampingan kepengurusan KIMBis di Kabupaten Lamongan adalah berupa sertifikasi PIRT bagi pelaku usaha yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha pengolahan, disamping itu sertifikasi PIRT memberikan dampak perluasan pasar dan dikenalnya produksi hasil olahan perikanan kawasan Weru kompleks oleh masyarakat.

Produk akhir dari adanya kegiatan pemberdayaan di KIMBis Kabupaten Lamongan ada pada kemandirian masyarakat antara lain mampu memunculkan solusi di setiap permasalahan usahanya, kesadaran dan kemauan bergerak di dunia perikanan dan nelayan, serta mampu berkelompok dan memobilisasi sumberdaya di lingkungannya secara kolektif. Pemberdayaan ini dititik beratkan pada inovasi rekayasa sosial pada diri masyarakat nelayan dan perikanan, gagasan pembangunan sumberdaya manusia yang berbasis IPTEK, dan upaya peningkatan kehidupan nelayan. Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan, melalui

beroperasinya sebenarnya KIMBis merupakan bentuk pemberdayaan, berbicara pemberdayaan berarti manusia sebagai subjek yang digerakkan dan menggerakkan. Gagasan BALITBANGKP sejauh ini telah membantu perkembangan KIMBis di Kabupaten Lamongan, menjadi keuntungan tersendiri bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, dan dalam aktivitasnya KIMBis juga banyak memusatkan perhatian pada kegiatan yang berpusat pada manusia melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Weru. Hal sebagaimana dimaksud seperti disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta sebagai Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara berikut:

“...KIMBis itu bukan hasil penelitian loh ya, *role model* pemberdayaan yang dilaksanakan inisiator, mereka mau berkelompok tidak, mereka mau memperdayakan tidak, beda dengan Balai Besar Pengolahan, kalo Balai Besar Pengolahan itu dia melihat misalnya dia mau membuat apapun (produk) terus kemudian menjadi PIRT, *packing*-nya menjadi lebih baik, kemudian MUI, *Barcode* itu diteknologi, tapi kalo di KIMBis ndak seperti itu, KIMBis itu bagaimana orang itu mau bergerak, oh saya itu hidup diperikanan saya mau bergerak diperikanan, itu nilainya, nilai daripada pemberdayaan. Pemberdayaan itu mau berkumpul, mau berserikat mengangkat dirinya sendiri terus ada kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok usaha itu, itu yang disebut di KIMBis ini, nilainya bukan ditakaran teknologinya, tapi dia mau berkumpul berserikat, mau memecahkan *problem solving* di dia, jadi nilainya itu apakah kualitatif, iya. Jadi jangan terjebak di teknologi apa, di awal itu disebutkan KIMBis itu sebagai *role model* pemberdayaan. Kalo melihat proses pemberdayaan kelompok ini, kalo *role model* pemberdayaan kalo di ring 0-100 ya KIMBis Lamongan ya 80 lah, dia kan model pemberdayaan, apakah dari oleh untuk rakyat bisa terlaksana, menurut pendapat saya ya bisa terlaksana, ketika mereka di ajak omong pak ini di produk ini bisa dijual kesana, pak ini ada teknologi membuat ikan asap seperti ini dia mau, kemudian pak ada teknologi pake PIRT semua pake PIRT berarti kan ilmu getok tular pemberdayaan dimasyarakat kan mau didengar oleh masyarakat, ini cukup membantu program Dinas”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 10.30 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Arif Soedjanarta di atas, bahwa pemberdayaan di KIMBis sebagai nilainya adalah hal-hal yang ditunjukkan antara lain berupa aktivitas kelompok, mengangkat ataupun memberdayakan dirinya sendiri, adanya kegiatan-kegiatan di kelompok usaha, jadi tidak ditakaran teknologinya tetapi masyarakat mau berserikat, serta mau memecahkan masalahnya. Maka jika dibatasi ukuran ketercapaian hasil pemberdayaan masyarakat di kegiatan KIMBis Kabupaten Lamongan, sehingga sesuai dalam merujuk pada Kusnadi (2009:33) mengenai indikator keterberdayaan masyarakat nelayan yang ditandai dari 10 ketercapaian sosial ekonomi, maka akan diambil 4 indikator, yaitu:

- 1) Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat;

Ibu Adibah merupakan pelaku usaha pengolahan hasil tangkap laut di desa Weru menyebutkan bahwa usaha yang digeluti sebagai pendapatan tambahan menjadi meningkat setelah ikut serta dan aktif di KIMBis, hal ini dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...aktif dan terlibat, itu tergantung dari ibu-ibunya sebenarnya, alhamdulillah dengan adanya KIMBis bisa begini, bisa begitu itu aktif, lancar usahanya, sebelumnya kurang tahu dan produk masih belum bagus, sekarang ada pendampingan KIMBis kemasan lebih menarik dan higienis, penjualan juga meningkat”. (Wawancara pada tanggal 24 September 2014, pukul 08.30 WIB di Rumah Ibu Adibah Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Ketika ada pelatihan dalam kaitannya komunikasi diantara pelaku usaha dengan pengurus KIMBis dan stakeholder yang bertindak sebagai narasumber, seperti disampaikan oleh Ibu Ummu Khofifah bahwa pada pelatihan diadakan

meskipun ruang lingkup hanya di desa Weru yang mayoritas pengolah, akan tetapi dari hal sepele itu ibu-ibu pengolah dapat memahami maksud dari setiap pelatihan, antara lain menambah penghasilan, semakin fokus dengan potensi, dan jadi mengerti bahan baku hingga pemasaran yang efektif. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kegiatan KIMBis ya bermakna, ya bermanfaat, kan gini saat pelatihan diadakan, awalnya saya dan ibu-ibu gak ngerti potensi olahan ikan, karena ya di olah seadanya saja tanpa melihat penjualan yang tepat caranya, di KIMBis diajarkan dan dibantu lagi pas waktu pameran, kita di bantu jual produk, apa ya menambah penghasilan tambahan buat keluarga, di setiap pelatihan dan khususnya pendampingan kami dibimbing mulai nol sampai bisa, itu unggulnya kegiatan ini”. (Wawancara pada tanggal 24 September 2014, pukul 10.45 WIB di Rumah Ibu Mukhodasah Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

- 2) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan;

KIMBis melakukan penjajakan komunikasi pasar dan berkoordinasi bersama beberapa tempat pemasaran hasil perikanan, serta berpartisipasi ikut serta dalam berbagai kegiatan berupa pameran. Hal ini dilakukan dengan maksud promosi produk hasil pengolahan yang telah dihasilkan KIMBis dan kegiatannya. Pada kesempatan promosi produk dilakukan, pengurus KIMBis bersama pelaku usaha berkesempatan dan diberikannya dukungan fasilitas berupa kendaraan roda empat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada proses kegiatan tersebut, dukungan ini sekaligus memberi makna bahwa terjadi kerjasama dalam hal pemasaran produk. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ada *event* misalnya HJL (Hari Jadi Lamongan), Hari Nusantara, kegiatan perikanan, atau pameran KIMBis bersama pelaku usaha melakukan pemasaran, KIMBis menginformasikan “disana ada pameran” diajak kesana lalu mereka secara mandiri menjualnya. Dinas Kelautan dan Perikanan pun memfasilitasi roda empat yang dimodifikasi bisa mendisplay produk, secara rutin 1 minggu 2 kali (hari jumat dan minggu) di alun-alun Kabupaten Lamongan ada *car free day*”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 08.45 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Meskipun sejauh ini signifikansi kepada aspek ekonomi belum dicapai untuk memenuhi kebutuhan sekunder, akan tetapi kontribusi informasi mengenai diversifikasi aneka produk olahan hasil perikanan dirasakan oleh Ibu Hindun Janariyah selaku pelaku usaha pengolahan:

“...membuat krupuk, krispi, trasi, amplang, tik-tik, cuma bikin krupuk kalo kemasan nggak diajarkan sama sana (pusat), kalo kemasan saya dapatkan dari KIMBis Weru ini, saya jadi paham aneka produk karena diinformasikan dan dipraktekkan di tempat”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 08.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Untuk yang sifatnya jaringan kemitraan yang terjalin hingga dilakukan kegiatan kolektif bidang usaha sejauh ini belum dicapai oleh pelaku usaha, mereka lebih senang berusaha secara mandiri dengan mengembangkan relasi (langganan) hingga di luar kota.

3) Kondisi kualitas SDM berkembang dengan baik;

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan, bahwa keberadaan KIMBis di Kabupaten Lamongan telah mampu mencapai peningkatan SDM khususnya ibu-ibu pengolah yang ada di desa Weru, hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pemahaman mengenai cara-cara produksi hingga pemasaran dari yang awalnya belum mengetahui, belum memiliki usaha pengolahan ikan

laut, maka adanya motivasi dan pendampingan dari KIMBis warga desa Weru menjadi mengerti berwirausaha yang didasari potensi lingkungannya. Proses pengolahan yang dilakukan sejak semula dengan tradisional, maka hingga saat ini masyarakat telah memahami gagasan modernisasi alat pengolahan yang berbasis IPTEK.

- 4) Potensi sumberdaya lingkungan terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Warga desa Weru merupakan masyarakat pengolah, maka kemungkinan limbah dari proses produksi menjadi masalah lanjutan yang tidak dapat dihindarkan. Sejauh dari hasil temuan di lapangan, bahwa warga desa Weru relatif memiliki rasa takut terhadap teknologi baru yang mereka baru lihat, upaya Universitas Trunojoyo dan KIMBis mengadvokasi kebersihan lingkungan untuk mendaur ulang sampah menjadi biogas ternyata tidak di respon positif oleh warga. Hal ini seperti disampaikan dari Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Adanya limbah termasuk lingkungan kotor disitu, itu pernah datang mahasiswa dari Trunojoyo untuk memberikan alat penerapan teknologi pada masyarakat lewat KIMBis, nah itu diberikan KIMBis untuk ditaruh disini kenyataannya orang sini itu takut, itu loh limbah yang didaur ulang sebagai biogas itu pun diambil KIMBis tapi tidak ditempatkan disini, karena di iyakan sudah di foto, tinggal jalannya, Kades juga sudah siap *back up* warga, tanah pun yang digunakan itu TN (tanah milik negara), ternyata dari ibu pengolahnya itu tidak ada yang mau takut nanti meledak dan sebagainya, alatnya itu besar ukurannya itu 4 x ¼, akhirnya oleh KIMBis dibawah ke kranji, pengolah di kranji, masyarakat Weru sini pun sampai sekarang masih ada yang gak mau menggunakan tabung gas”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat hal itu, proses memahami masyarakat nelayan terkait pentingnya hidup bersih serta kelestarian lingkungan, sejauh ini belum maksimal karena pola penerimaan yang diliputi rasa kekhawatiran terhadap teknologi. Meskipun ada upaya, namun kondisi yang mendukung suasana lingkungan menjadi bersih oleh adanya kegiatan KIMBis masih belum tercapai. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Choirul Anhar, S.Ag selaku Kepala Desa Weru Kecamatan Paciran: “...mendukung terkait lingkungan belum ya, namun untuk produk kerajinan rumahan (*home industry*) itu lebih berkualitas, lebih profesional produknya”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 10.05 WIB di Balai Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Adapun foto untuk mendukung kondisi lingkungan kawasan Weru Komplek dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 18. Kondisi lingkungan pada jalan di kawasan Weru komplek
Sumber: Dokumentasi penulis

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Kegiatan KIMBis Sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

a. Faktor-faktor Mendukung

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIMBis merupakan wujud inisiasi Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) sebagai salah satu upaya untuk mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang salah satu kegiatannya adalah tentang mata pencaharian alternatif. KIMBis di Kabupaten Lamongan juga dikuatkan payung hukum oleh adanya Naskah Perjanjian Kerjasama agar terjalin berbagai dukungan dan kebertanggungjawaban para pihak untuk mewujudkan diseminasi dan pengawalan teknologi BALITBANG KP dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) adalah wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholders terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. KIMBis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung berlangsungnya proses dioperasikannya KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Adapun beberapa faktor yang mendukung pertama adalah dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan yang cukup besar diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, keterlibatan dan komitmen Penyuluh, dan dukungan Pemerintah Desa Weru sebagai lokasi pelaksanaan KIMBis. Dinas Kelautan dan Perikanan telah membangun sosialisasi keberadaan KIMBis diberbagai kegiatannya baik secara formal dan tidak formal. Membangun relasi antar pemangku kepentingan dan memperkuat kelembagaan dengan berbagai fasilitasi dengan SKPD lain (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Pengolah Data Elektronik (PDE), dan Dinas Kesehatan) dilakukan sebagai wujud kebertanggungjawaban subjek pada Naskah Perjanjian Kerjasama. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan:

“...kita dorong (KIMBis) menjadi lembaga profesional sebagaimana dia dibentuk dengan memperkuat jaringan, kalo tenaga ahli kan bisa di *sharing*-kan, kemudian kita berusaha tidak sendiri Dinas Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan ketika ada PIRT, dengan Diskoperindagkop baik itu kelembagaan usaha, PDE (Pengolah Data Elektronik) dg *website*, kita dekatkan dengan program Bappeda dengan program Gemerlap, secara khusus seperti itu. Karena di perjanjian itu sebetulnya tidak hanya di Dinas Perikanan tapi harapannya pemerintah daerah. Sosialisasi terus dibangun Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung KIMBis, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, kepala desa, kecamatan, penyuluh. Informalnya kami jelaskan keberadaan KIMBis untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat terutama nelayan agar berdaya, tidak ada kaitannya dengan fasilitasi keuangan atau bantuan. Kepada masyarakat melalui rapat-rapat RT, PKK, RN, kelompok pembudidaya, kelompok garam, kelompok pengolahan”. (Wawancara

pada tanggal 17 September 2014, pukul 09.45 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Selain adanya dukungan dan komitmen berupa sosialisasi, Pemda Kabupaten Lamongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan bantuan berupa fasilitas peralatan yang diberikan kepada kelompok pengolah binaan KIMBis. Hal ini seperti disampaikan oleh Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“...sampai saat ini, kami diberikan Dinas itu alat-alat untuk pengolahan (ada pemotong dan pengupas daging dari duri) yang itu kemarin saya ajukan proposal dari Koperindag, jadi dari Dinas Perikanan mulai dari *freezer* (kulkas), pengaduk 1 buah berkapasitas 25 Kg harganya mahal itu sampai 28 juta, pemotong 1 buah semua diberikan ke KIMBis, dan digunakan untuk kelompok, ada mobil perikanan itu untuk KIMBis itu yang dibawa pak Pur mobil itu untuk KIMBis itu diberikan kepada KIMBis, kalo anggaran tidak ada, terus ada juga dikasih *pedal siller* untuk ngepres kemasan”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Dalam kaitannya pengenalan produk olahan hasil kegiatan KIMBis, pengurus bersama pelaku usaha juga berupaya melakukan pemasaran kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan dengan mengikuti berbagai pameran yang diadakan. Bentuk dukungan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah memfasilitasi KIMBis berupa kendaraan roda empat yang dimodifikasi dapat *men-display* produk, ini diberikan khusus untuk KIMBis. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau ada *event* misalnya HJL (Hari Jadi Lamongan), Hari Nusantara, kegiatan perikanan, atau pameran KIMBis bersama pelaku usaha melakukan pemasaran, KIMBis menginformasikan “disana ada pameran”

diajak kesana lalu mereka secara mandiri menjualnya. Dinas Kelautan dan Perikanan pun memfasilitasi roda empat yang dimodifikasi bisa *display* produk, secara rutin 1 minggu 2 kali (hari jumat dan minggu) di alun-alun Kabupaten Lamongan ada *car free day*". (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 08.45 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melihat wujud dukungan di atas, tampaknya Dinas Kelautan dan Perikanan sangat *care* dan berkomitmen terhadap keberlangsungan kegiatan KIMBis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan. Selain itu, dikuatkan adanya profil KIMBis Kabupaten Lamongan tahun 2014 yang menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang berkelanjutan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan salah satu diantaranya adalah Pembinaan Program KIMBis (Profil KIMBis Kabupaten Lamongan, 2014). Kaitannya dengan penyelarasan program kerja KIMBis dengan program pemberdayaan masyarakat di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan telah terjadi sinkronisasi penyelarasan kegiatan. Program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kelautan dan Perikanan yang diselaraskan dengan KIMBis adalah program minapolitan menuju industrialisasi perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, juga dilakukan dukungan dengan memperkuat relasi berupa penguatan program-program bebantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikoordinir Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah program PUMP dan program PUGAR, sejauh ini KIMBis berupaya mengawal dan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah untuk mendukung industrialisasi perikanan dengan dilakukannya kegiatan pelatihan-pelatihan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok pengolah, kelompok garam, dan kelompok budidaya. Adanya hubungan relasi dan

penyelarasan yang dibangun KIMBis, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan berharap banyak terhadap optimalisasi kinerja KIMBis di masa yang akan datang.

Keterlibatan dan komitmen penyuluh, keterlibatan peran berharga dalam berbagai kesempatan ditunjukkan adanya komitmen penyuluh perikanan, secara keseluruhan berjumlah 12 tenaga penyuluh di siapkan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam suksesi pelaksanaan kegiatan KIMBis. Pada kegiatan KIMBis penyuluh hadir pada aktivitas pelatihan yang sedang dilakukan. Hal ini seperti disampaikan Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan: “Penyuluh yang terlibat di kegiatan KIMBis ini seluruh penyuluh yang berjumlah 12 orang, ini penyuluhnya Dinas Kelautan dan Perikanan, mereka disiapkan untuk membantu KIMBis”. (Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 11.35 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Hal ini juga dikuatkan adanya pernyataan dari Bapak Toha Muslih sebagai Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Penyuluh terlibat dalam kegiatan KIMBis tidak hanya di kawasan Kecamatan Paciran, namun juga di luar Kecamatan yang menjadi lokasi KIMBis ini, tergantung dimana lokasi acara berlangsung, mereka kami undang ataupun sebaliknya kami diundang untuk memberikan pelatihan pada wilayah kewenangannya ditempatkan. Diharapkan kegiatan kami ini mampu menjangkau wilayah se-Kabupaten Lamongan. Kami saling memberi informasi mengenai isu apa yang saat ini menjadi permasalahan kelautan perikanan, secara timbal balik komunikasi itu terjadi”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Selain itu, adanya aktivitas komunikasi dan koordinasi pada lingkup stakeholders secara rutin dan lebih sering terutama bagi pengurus KIMBis, Penyuluh, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan secara kontinyu terjadi setiap bulan, sehingga dapat dikatakan tiga komponen stakeholders tersebut terutama penyuluh sejauh ini telah melakukan komitmen proses kerjasama dalam mewujudkan kegiatan KIMBis. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Suyuh Khoriri sebagai *Liaison Officer* (LO) Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Setiap bulannya ada rapat dan koordinasi antara KIMBis, Penyuluh dan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setiap awal bulan, jadi disana kami *sharing* misalnya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyuluh barangkali itu bisa kami sampaikan ke pusat atau juga bisa ditawarkan menu pelatihan di wilayah dampungannya itu”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.47 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Dukungan pemerintah Desa Weru, beroperasinya KIMBis di lokasi tidak akan dapat berlangsung dan berkelanjutan tanpa adanya dukungan dan jaminan pemerintah desa. KIMBis Kabupaten Lamongan dalam kegiatannya, selalu mendapatkan dukungan dari Kepala Desa Weru dan perangkatnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Kabupaten Lamongan:

“Dukungan Kades Weru dan perangkatnya sangat bagus termasuk dari Desa-desa yang pernah diadakan pelatihan oleh KIMBis ini. Kades Weru dan perangkatnya memberikan dan menjamin suasana yang kondusif pada setiap pelatihan berlangsung. Juga membantu dalam menginformasikan kepada masyarakat nelayan mengenai keberadaan dan wujud KIMBis”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 11.50 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Hal ini dalam konfirmasinya, Kades Weru memang telah mendukung penuh sebab keberadaan KIMBis di lokasi studi telah berbuat banyak dalam mendukung program pemerintah desa kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Choiril Anhar, S.Ag selaku Kepala Desa Weru Kecamatan Paciran, di bawah ini:

“...KIMBis di desa kami, sangat membantu masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan, terkait dengan kerajinan rumah, dari pengolahan hasil laut maupun lainnya, desa mendorong segenap warga masyarakat setiap kegiatan atau yang dilakukan oleh KIMBis, masyarakat pun antusias mengikuti kegiatan, kami mendukung serta menyambut baik kegiatan ini karena kalo kita kaitkan dengan program desa sangat membantu, masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi rumahan itu bisa pinjam modal dari dana PNPM dan dana koperasi wanita, ini bisa dimanfaatkan untuk usaha masyarakat yang kaitannya dengan KIMBis. Kita fasilitasi sepenuhnya, jadi untuk ijin bikin di awal saja waktu pembentukannya dan kegiatannya baik di pendopo atau di wilayah lain setingkat desa, ya langsung aja, *monggo* dimanfaatkan untuk kegiatan KIMBis”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09:50 WIB di Balai Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Faktor yang mendukung kedua adalah keuntungan dari peran Manajer klinik sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas KP Kecamatan. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha:

“Semestinya *Liaison Officer* (LO) nya yang bertugas membagi dan penghubung berbagai informasi, karena manajer ini juga penyuluh Kecamatan Paciran dan Brondong jadi lebih enak hubungannya kalau ada perlu dikomunikasikan. Manajernya ini juga merangkap sebagai kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 10.24 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Hal ini dalam konfirmasinya, juga dikuatkan oleh Bapak Zainun selaku Asisten Manajer Bidang Penguatan Kelembagaan dan Bimbingan Anggota yang

mengatakan bahwa tantangan terberat setiap organisasi sebetulnya ada pada unsur birokratis, namun di KIMBis Kabupaten Lamongan ini pelaksana tingkat lokasi menghendaki KIMBis tidak menjadi rumit, secara tidak langsung telah memotong dan merampingkan saluran komunikasi yang berjenjang. Hal ini seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Kebetulan atau penunjukan pengurus itu bukan menjadi soal, yang terpenting adalah KIMBis dapat berjalan dinamis, maka dari itu komunikasi berjenjang hendaknya dirampingkan agar dapat diterima lebih mudah semua pengurus dan Kabupaten, mengenai ini KIMBis diuntungkan dengan manajer sebagai penyuluh dan ketua UPT Dinas Perikanan Kecamatan Paciran”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 09.40 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

b. Faktor-faktor Menghambat

Bentuk pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) adalah kemitraan sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan. KIMBis dibentuk sebagai wadah dalam melaksanakan program peningkatan kehidupan nelayan melalui kegiatan komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan *stakeholders* terkait, melalui pendekatan *technopreneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. Terdapat beberapa faktor yang menghambat ketercapaian kegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan.

Faktor pertama yang menghambat adalah kurangnya intensitas komunikasi diantara masyarakat dengan *stakeholders*. Penjaringan berbagai kebutuhan teknologi terdukung pemberdayaan hendaknya dilakukan tidak hanya pada

kegiatan pelatihan berlangsung, melainkan pada suasana-suasana yang tidak formal pengurus bisa mengidentifikasi berbagai kemungkinan inovasi rekayasa teknologi dan inovasi rekayasa sosial yang dapat diterapkan pada lokasi pelaksanaan dan sekitarnya, juga potensi yang dapat diambil dan saling menguntungkan baik pihak sumber teknologi ataupun pihak pengguna teknologi. Melalui hal ini, suasana yang mendukung itu tidak lain adalah penjangkaran dan identifikasi kebutuhan teknologi inovasi yang dilakukan dari hasil komunikasi saat pelatihan maupun konsultasi timbal balik pada ruang-ruang tidak formal/diadakan. Hal ini dapat menentukan tercapai tidaknya intervensi teknologi inovasi versi inisiatif dari pelaksana lokasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa aktivitas interaksi secara keseluruhan dalam menjalankan KIMBis dilakukan pada kegiatan pelatihan mengakibatkan intensitas komunikasi menjadi kurang. Hal ini seperti pada kutipan berikut ini:

“Sejauh teramati teman-teman KIMBis ini kalau secara kegiatan bersemangat, pada pelatihan umumnya. Jadi banyak interaksi spontan terjadi itu pada aktivitas pelatihan. Sehingga maksud komunikasi dan dialog rancu di lapangan yang sebenarnya tidak hanya dilakukan di pelatihan saja, membuat interaksi yang seharusnya dilakukan belum mampu dijalankan”. (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 11.45 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Selain kurangnya intensitas komunikasi diantara masyarakat dengan stakeholder, faktor kedua yang menghambat adalah *tool* penunjang operasionalisasi KIMBis berupa petunjuk teknis kegiatan dianggap pelaksana lokasi kurang sesuai dengan lokasi atau realitas di lapangan. Berdasarkan hasil

pengamatan di lapangan dan wawancara dengan Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan, bahwa sejauh ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencatat kelemahan konsep operasional KIMBis yang ditetapkan pusat, untuk menjadi pusat kegiatan maka lembaga ini harus mampu dan berkapasitas secara luas, tidak seharusnya berkuat di lokasi Desa Weru dan berfokus pada produk perikanan saja, pengurus tidak begitu berkomitmen dan memahami konsep awal KIMBis ini dibentuk. Kelemahan lain, adalah konsistensi tujuan awal pembentukan lembaga telah bergeser mengarah kepada produk padahal sejak semula KIMBis tersosialisasikan BBPSEKP dipahami Kabupaten Lamongan sebagai lembaga yang seperti klinik dimana orang dapat berobat ketika mengalami sakit, melihat kondisi Desa Weru sebagai kawasan pengolahan hasil laut maka pengurus dan Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat pengolah, garam, dan budidaya saja, melalui ini BBPSEKP dianggap kurang jeli melihat permasalahan dan wilayah yang hendak dilakukan proses pemberdayaan, yang semestinya potensi besar yang dapat diambil dari KIMBis adalah aspek kerjasama diantara stakeholder di wilayah pesisir. Berkaitan dengan hal ini secara bertahap Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP dalam *road map* nya akan berangsur memandirikan KIMBis termasuk di Kabupaten Lamongan. Hal ini sebagaimana dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Sebetulnya yang menjadi catatan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait kegiatan KIMBis ini adalah tentang wilayah kerja klinik (lokasi pelaksanaan) dan kepengurusan yang ditetapkan pada *standart operasional prosedur* (SOP) Juknis KIMBis, itu yang menjadi catatan sampai hari ini. Untuk menjadi lembaga pemberdaya semestinya harus ada tenaga ahli, kalau menjadi pusat kegiatan berarti harus mampu menjangkau seluruh

wilayah Lamongan, sejauh ini kan fokus saja di Weru. Perlu diketahui, secara bertahap Balai Besar inisiator KIMBis akan memandirikan klinik bentukannya”. (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 09.30 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Pernyataannya di atas, juga dikuatkan dalam kesempatan wawancara pada tanggal 17 September 2014 dalam kutipan wawancara berikut:

“...begini, orang balai besar sendiri kan di sosial ekonomi, itu terlalu sulit kalo saya menilai dia dapetnya bagaimana, ujung-ujungnya ya produk, kalo di Jakarta itu dia produk, di P2HP juga produk apa bedanya, ketika ditampilkan di KKP loh hasilnya kok hampir sama, ujung-ujungnya produk, artinya di Jakarta sendiri masih rancu antara yang dihasilkan, kok lucu padahal balai besar menampilkan seperti klinik orang mau berobat, tapi justru tampilan produk, kan sama ini dengan temen-temen di direktorat lain”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014, pukul 10.15 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Faktor ketiga yang menghambat adalah adanya resistensi dan respon dari masyarakat sasaran. Berdasarkan pernyataan Bapak Masrur Hadi selaku Asisten Manajer Klinik Bidang Pengembangan Usaha, disampaikan bahwa *feed back* dari inisiatif masyarakat kelompok nelayan dari sekian kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan dinilai kurang. Hal ini seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Saya melihatnya begini, jadi masyarakat itu sifatnya pasif. Kami pun juga berharap ada respon dari masyarakat nelayan Desa Weru Komplek ini misalnya punya masalah lalu datang ke kami untuk komunikasi itu yang masih sangat rendah seperti itu, setelah ada pelatihan terhadap kelompoknya silahkan berkonsultasi jika belum memahami materi, termasuk di sekretariat”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 08.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Adanya respon berupa *feed back* dari masyarakat kaitannya dengan tindak lanjut pelatihan yang masih lemah, juga dikuatkan oleh Bapak Toha Muslih selaku

Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Meskipun kegiatan ini dilakukan di desa Weru bagi mereka pemberdayaan masyarakat pada KIMBis ini dianggap seperti program lain, membagi uang dan material, itu yang pernah kami alami pada beberapa pelatihan. Mereka belum memahami saja KIMBis secara menyeluruh”. (Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, pukul 11.55 WIB di Sekretariat Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Faktor yang keempat sebagai penghambat adalah tidak adanya regulasi lanjutan ataupun kebijakan yang menguatkan KIMBis di Kabupaten Lamongan. Dalam peranan ideal KIMBis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan program pemberdayaan yang terintegrasi, agar setiap kelompok masyarakat mempunyai motivasi untuk membangun usaha ekonomi secara mandiri dan berkelompok. Selain itu, memberikan kesempatan berbagai instansi untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan secara terpadu. Melihat hal tersebut, KIMBis seharusnya dilengkapi Regulasi dan iklim Kebijakan yang mendukung beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan agar mendapatkan dukungan dan jaminan pemanfaatan KIMBis secara bersama, namun sebaliknya minat berbagai instansi pemerintahan masih minim, adanya kekhawatiran kegiatan KIMBis hanya fokus kepada sektor kelautan. Hal ini seperti disampaikan Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Kebijakan yang menguatkan KIMBis ini sebenarnya ada satu-satunya di Dinas Kelautan dan Perikanan berupa perjanjian kerjasama saja, misalnya KIMBis dan pemerintah Kabupaten komitmen dan menghasilkan kebijakan saya pikir ini akan jadi kekuatan bagi kami selanjutnya. Diskoperindagkop, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kelautan Perikanan sendiri itu yang pernah terjalin komunikasi. Kadang kan gini pemerintah

misalnya di Desa itu sudah memiliki kader sendiri, KIMBis kan fokus perikanan, kalau itu diberikan ke KIMBis nanti kan yang muncul nama Dinas Kelautan dan Perikanan, ada ego sektoral juga muncul. Itu yang saya baca masih seperti itu. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 09.37 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Keberadaan dan kelanjutan KIMBis selain hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan, dimasa depan keberlanjutannya juga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini tampaknya tidak mudah, diperlukan sumberdaya yang besar dan komitmen baik dari konteks politik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan:

“Ketika KIMBis diperdakan itu tidaklah semudah yang dibayangkan, harus ada komitmen diberbagai pemangku kepentingan, dibutuhkan sumber daya yang besar hal yang kecil misalnya anggaran, mereka juga perlu itu. Rapat pun juga berkali-kali, mereka yang di undang juga harus ada konsumsi”. (Wawancara pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 11.15 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Selain dari adanya faktor-faktor yang menghambat berlangsungnya proses dioperasikannya KIMBis di Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan yang sifatnya operasional, juga terdapat beberapa temuan faktor-faktor yang menjadi penghambat ketercapaian target kinerja beroperasinya KIMBis di Kabupaten Lamongan (upaya membangun jaringan kerja dan renovasi teknologi) pada saat penelitian ini dilakukan. Faktor pertama yang menjadi penghambat ketercapaian target KIMBis adalah kurang jelasnya tujuan atau tujuan kurang menarik bagi semua pihak (terutama Dinas Kelautan dan Perikanan beranggapan terjadinya inkonsistensi dari adanya penyampaian perjanjian

kerjasama), terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan makna, maksud dan tujuan dari kegiatan pada awal koordinasi. Adanya ketidaksepahaman diantara kedua lembaga, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan maksud dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi (BBPSEKP) berkegiatan KIMBis di Kabupaten Lamongan, tampaknya menjadikan kolektifitas kegiatan kerjasama kurang optimal, kejelasan tujuan atau tujuan kurang menarik bagi pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan karena penyampaian tujuan pembentukan KIMBis sejak awal adalah *role model* pemberdayaan dimana masyarakat diharapkan mampu memahami permasalahannya, mampu memecahkannya, intensitas berkonsultasi dan berkomunikasi datang ke klinik (KIMBis) sebagai wadahnya, akan tetapi adopsi inovasi yang sering dimunculkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, maka konsistensi dari BBPSEKP dinilai kurang oleh Kabupaten Lamongan. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri juga kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya KIMBis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Soedjanarta selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kabupaten Lamongan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“...keberhasilannya sana itu (pusat) juga dipengaruhi dari faktor apa kalo ditanya balik dengan adopsi teknologi, apakah ini menjadi tujuan pertama ketika KIMBis ini dilakukan, karena pernah saya tentang sendiri dari 6 profesor peneliti termasuk bu siapa itu, kalo saya katakan sulit karena dia ini kan di sosial ekonomi, pemberdayaan di sosial ekonomi lha ini kok maunya lari ke adopsi, seharusnya ini bukan wilayahnya, kebawahnya itu kan harapannya masyarakat itu memahami akan permasalahan dia, apa yg menjadi masalah dia, kalo dia ndak sakit ya ndak suntik, bahasa kasarnya seperti itu, saya sampaikan seperti itu, mengapa kok satu desa kemudian desa lain, ini juga berpengaruh terhadap peneliti, jangankan kok begitu, 6 profesor peneliti yang hadir itu ndak sepaham kok, sejak awal kan saya sampaikan, KIMBis ini kan menjadi role model pemberdayaan, masih menjadi pertentangan”. (Wawancara pada tanggal 17 September 2014,

pukul 11.00 WIB di Kantor Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan).

Melalui dibentuknya, KIMBis juga diarahkan kepada upaya membangun jaringan kerjasama, KIMBis Kabupaten Lamongan diberikan peran dalam membangun relasi antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, dan pengusaha) di Kabupaten Lamongan khususnya kawasan pesisir untuk bersama-sama diselarkannya program kegiatan serta bertindak secara kolektif dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan. Perhatian penting KIMBis sejauh ini masih kepada penguatan program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan dengan memaksimalkan peran peneliti BALITBANGKP dan tenaga penyuluh untuk bersama-sama membentuk suatu masyarakat yang diperlengkapi pengetahuan inovasi kualitas produksi, sehingga yang dilakukan untuk merangkul *stakeholders* dalam kegiatan kolektif berupa kegiatan ekonomi kawasan pesisir yang saling melakukan pertukaran sumberdaya hasil perikanan dan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat menjadi kurang dibidik. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Toha Muslih selaku Manajer Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Jadi kan gini sebenarnya itu, KIMBis kedepan mestinya juga perlu adanya bentuk kerjasama, ini juga bisa membantu pelaku usaha, pemberdayaan pun secara langsung makin nampak geliatnya, di buku teknis kan gitu bunyinya, sementara ini memang KIMBis untuk membangun hubungan, makanya sosialisasi dan gabungan kegiatan di pemerintahan Kabupaten Lamongan menjadi dilakukan. Untuk yang dimaksud usaha membangun kerjasama kami kan sudah tadi itu, cuma yang saya lihat sekarang ini kan peneliti pusat itu lebih banyak disebarakan berupa inovasi ke masyarakat mengenai produksi pengolahan yang benar, teman-teman penyuluh juga terlibat membantu KIMBis dalam pelatihan dan praktek, kegiatan nyata di lapangan seperti pertukaran sumberdaya

ekonomi belum kesitu”. (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2014, pukul 13.45 WIB di rumah Bapak Suyuh Khoriri selaku *Liaison Officer* (LO) KIMBis Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Melalui hal di atas dan diperkuat adanya definisi KIMBis dimana peran penting tiga aktor utama yang dimaksud dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama. Peneliti, penyuluh, dan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedangang, dan investor) sejauh ini dapat dikatakan baru fokus untuk berproses kepada peranan peneliti Balitbang-KP melalui inovasi rekayasa sosialnya dan peran tenaga penyuluh dimaksudkan untuk membantu menterjemahkan ke dalam praktik pada media komunikasi (pelatihan). Sehingga, tindakan di lingkup pelaku usaha hingga keterlibatan investor sejauh ini belum nampak, kelompok masyarakat dan pelaku usaha baru dirangkul oleh KIMBis dan diarahkan kepada masyarakat yang berpengetahuan inovasi produksi baik di kelompok pengolahan, garam, serta budidaya melalui kegiatan-kegiatan pada pemberdayaan dan pendampingan.

Faktor kedua yang menjadi penghambat ketercapaian target KIMBis adalah lokasi studi atau kegiatan tergolong sebagai masyarakat berkategori yang mayoritas akhir dalam penerimaan terhadap teknologi inovasi. Sejauh dari hasil temuan di lapangan dan wawancara dengan pengurus lokasi kegiatan KIMBis, bahwa sikap ataupun karakter warga nelayan Desa Weru untuk menerima inovasi tidak jauh beda dengan masyarakat pada umumnya, diliputi rasa kekhawatiran terhadap hal-hal yang dianggap baru dan cenderung meniru/mengadopsi inovasi jika dilihatnya salah seorang di lingkungannya menerapkan dan telah berhasil. Hal

ini seperti disampaikan dari Ibu Hamida selaku Asisten Manajer Promosi dan Pemasaran Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) Kabupaten Lamongan:

“Adanya limbah termasuk lingkungan kotor disitu, itu pernah datang mahasiswa dari Trunojoyo untuk memberikan alat penerapan teknologi pada masyarakat lewat KIMBis, nah itu diberikan KIMBis untuk ditaruh disini kenyataannya orang sini itu takut, itu loh limbah yang didaur ulang sebagai biogas itu pun diambil KIMBis tapi tidak ditempatkan disini, karena di iyakan sudah di foto, tinggal jalannya, Kades juga sudah siap *back up* warga, tanah pun yang digunakan itu TN (tanah milik negara), ternyata dari ibu pengolahnya itu tidak ada yang mau takut nanti meledak dan sebagainya, alatnya itu besar ukurannya itu 4 x ¼, akhirnya oleh KIMBis dibawah ke kranji, pengolah di kranji, masyarakat Weru sini pun sampai sekarang masih ada yang gak mau menggunakan tabung gas”. (Wawancara pada tanggal 23 September 2014, pukul 09.45 WIB di Rumah Ibu Hindun Desa Weru Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).

Sehingga, dapat dikatakan jika dirujuk kepada disebarkannya teknologi berupa inovasi rekayasa teknologi dari BBPSEKP hingga sekarang belum dilakukan, hal ini dikarenakan sikap penerimaan masyarakat nelayan Desa Weru yang cenderung mengambil keputusan jika kebanyakan orang telah merasakan manfaatnya. Umumnya sejauh yang diamati di lokasi studi, masyarakat kelompok pengolah hasil tangkap di Desa Weru memproduksi dan mengolah hasil laut dengan dilakukan secara biasa dan dipasarkan begitu saja. Identifikasi sikap penerimaan terhadap inovasi menjadi perlu diperhatikan, mengingat berhasil tidaknya pengaplikasian ide gagasan untuk saat ini dan dimasa depan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dapat memahami keuntungan relatif dan kesesuaian dengan norma dari adanya inovasi dan teknologi yang disebarkan.